

NOTA DINAS
NOMOR: 204/IJ-IND/PR/VII/2020

Kepada Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan II tahun 2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 10 Juli 2020

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Eselon I Inspektorat Jenderal Triwulan II (April-Juni) 2020.

Kami sampaikan bahwa realisasi keuangan Inspektorat Jenderal pada triwulan II tahun 2020 (April-Juni) mencapai Rp6.632.793.633,- atau sebesar 22,02% dari pagu anggaran sebesar Rp30.111.422.000,- dengan realisasi fisik sebesar 31,43%. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II (Januari-Juni) mencapai Rp12.494.522.423,- (41,49%) dengan realisasi fisik sebesar 45,08%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL



t t d

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal

ARUS GUNAWAN

N O T A D I N A S
NOMOR: 204/IJ-IND/PR/VII/2020

Kepada Yth : Menteri Perindustrian

Dari : Inspektur Jenderal

Hal : Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan II tahun 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tanggal : 10 Juli 2020

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Laporan PP 39) Eselon I Inspektorat Jenderal Triwulan II (April-Juni) 2020.

Kami sampaikan bahwa realisasi keuangan Inspektorat Jenderal pada triwulan II tahun 2020 (April-Juni) mencapai Rp6.632.793.633,- atau sebesar 22,02% dari pagu anggaran sebesar Rp30.111.422.000,- dengan realisasi fisik sebesar 31,43%. Adapun realisasi keuangan sampai dengan triwulan II (Januari-Juni) mencapai Rp12.494.522.423,- (41,49%) dengan realisasi fisik sebesar 45,08%.

Demikian, atas perkenan dan arahan Bapak lebih lanjut, disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL



t t d

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal

ARUS GUNAWAN



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

**TRIWULAN II
TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JAKARTA, Juli 2020**

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, Juli 2020

INSPEKTUR JENDERAL



ARUS GUNAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program.....	1
I.3. Struktur Organisasi	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	10
II.1. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020	10
II.2. Indikator Kinerja Program / Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020	11
II.3. Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Tahun 2020	13
II.4. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	14
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	20
III.1. Hasil yang Telah Dicapai	20
III.2. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas.....	10
Tabel 2. Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020	11
Tabel 3. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020	14
Tabel 4. Perubahan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020	20
Tabel 5. Realisasi fisik dan keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2020	21
Tabel 6. Rincian Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal.....	22
Tabel 7. Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal	3
Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat I	6
Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat II	7
Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III	8
Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV	9

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan internal di Lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi - fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya :

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

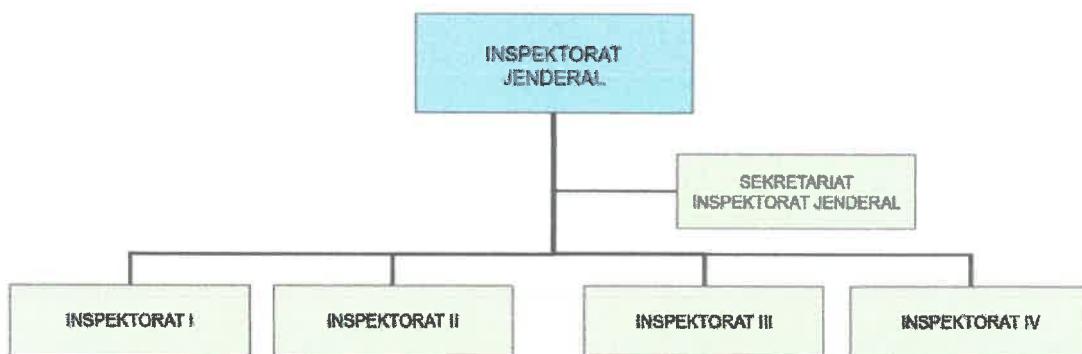
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari :

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;

- Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan;
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi; dan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Bagian Program menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program.
- b. Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut dan evaluasi hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.

Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - 2) Sub Bagian Evaluasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan.
- c. Bagian Keuangan dan Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, karsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.

- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.

Bagian Keuangan dan Umum, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan perpendaharaan dan gaji pegawai, akuntansi dan pengelolaan barang milik negara.
 - 2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, sistem informasi dan tata usaha serta penyusunan bahan publikasi.
- d. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai; dan
- Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dna konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja pegawai.
- 2) Sub Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan hukum, dan konsultasi bidang pengawasan, organisasi dan tata laksana, serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

2) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

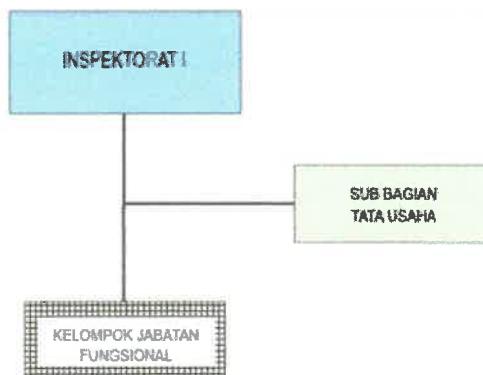
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha

- Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektorat.

Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Bagan Organisasi Inspektorat I

3) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Bagan Organisasi Inspektorat II

4) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Indutri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit

Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

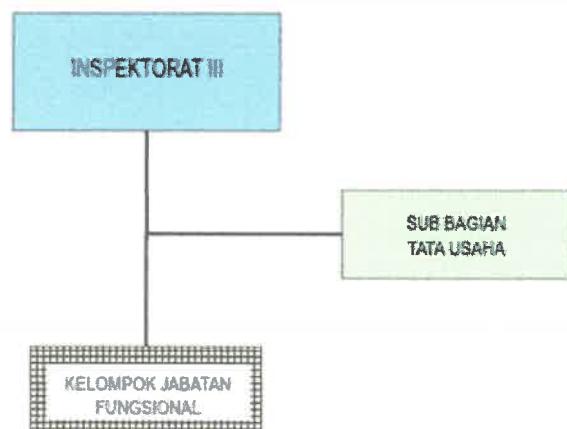
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektorat.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 5. Bagan Organisasi Inspektorat III

5) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayah, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

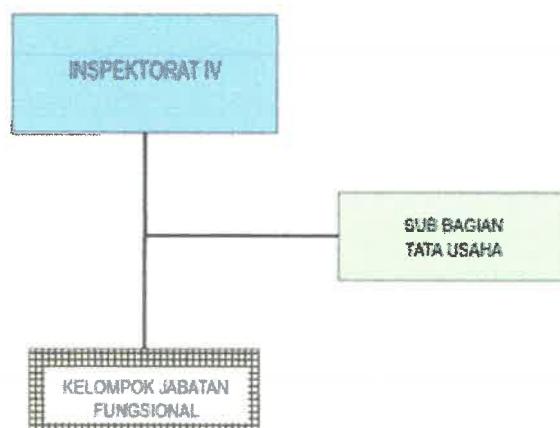
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektorat.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 6. Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

II.1. Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan "Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian", dengan kegiatan pada Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Aparatur Kementerian Perindustrian

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal	- 7 Laporan - 60 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal	- 7 Laporan - 7 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	- Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas	- 7 Laporan - 55 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
		- Layanan Audit Internal	
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen Kinerja Pengawasan dan pelaporan kinerja - Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit kerja Cakupan - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 7 Laporan - 7 Laporan - 2 Laporan - 1 Layanan
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I - Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Layanan Perkantoran 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Layanan - 1 Layanan - 12 Layanan

II.2. Indikator Kinerja Program / Kegiatan Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024, Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	JENIS INDIKATOR	TARGET
Stakeholders Perspective				
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal	IKU	1,5%
		Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	IK	10%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	IK	80%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja	IKU	91%

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	JENIS INDIKATOR	TARGET
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi area penguatan pengawasan	IK	70%
		Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	IKU	Level 3
<i>Internal Process Perspective</i>				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	IK	75%
		Capaian IACM Inspektorat Jenderal	IK	Level 3 IACM
		Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	IK	76%
<i>Learn and Growth Perspective</i>				
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	IK	10%
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	IK	50%
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	IK	70%
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	IK	80%
		Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	IK	80%
		Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	IK	90%
5	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	IK	50%
		Persentase APIP yang mendapatkan diklat	IK	50%

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	JENIS INDIKATOR	TARGET
		kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat		
		Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	IK	90%
		Layanan Perkantoran	IK	12 Bulan Layanan

II.3. Rencana Aksi Program Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Rencana aksi pelaksanaan target kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Tahun 2020 disampaikan pada lampiran dalam laporan ini.

II.4. Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Untuk mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, telah di susun Informasi Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2020, yang menggambarkan sasaran, indikator kinerja, target dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. Informasi Kienra Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO <i>Stakeholders Perspective</i>	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU	1,5%	<p>INSPEKTORAT I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monitoring dan Evaluasi SAKIP satuan kerja cakupan tugas Insektorat I - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan Koordinasi pendampingan/pengawalan kegiatan berisiko tinggi dan Pembinaan Pengawasan Kinerja - Pelaksanaan pendampingan/pengawalan kegiatan berisiko tinggi (Pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesit/Peralatan Pendidikan dan pembinaan tenaga kerja/tenaga pendidik - Pelaksanaan pembinaan pengawasan kinerja oleh pimpinan - Reviu LK dan BMN satker Cakupan Tugas Inspektorat I - Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Cakupan Tugas Inspektorat I <p>INSPEKTORAT II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB dan Monev DAK)

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
				<ul style="list-style-type: none"> - Tinggi - Pengawalan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan INSPEKTORAT III - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Pengawalan penyelesaian hibah BMN - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan INSPEKTORAT IV - Audit Kinerja, Audit Khusus, Reviu RKAKL - Monev SAKIP satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi - Reviu Laporan Keuangan dan BMN satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV - Reviu pengendalian Intern atas pelaporan keuangan - Reviu RKBMIN

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
1	Maksimum rekomendasi pengawasan tidak ditindaklanjuti	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	10% Rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja *IKU	<p>INSPEKTORAT I, II, III, IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja - Audit Khusus - Reviu RKAKL <p>IR I, II, III, IV</p> <p>Pengawasan sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat</p> <p>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemutakhiran data tindak lanjut - Analisa dan laporan hasil pengawasan - Fasilitasi kegiatan reviu RKAKL - Fasilitasi evaluasi SAKIP - Fasilitasi klinik konsultansi Itjen - Fasilitasi pembinaan bidang pengawasan oleh pimpinan - Inspektorat Jenderal ke Satker <p>INSPEKTORAT I, II, III, IV:</p> <p>Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forum Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian (PMPRB) - Penilaian mandiri satuan kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Perindustrian
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan nilai RB area pengawasan pengawasan	70%	<p>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Maturitas SPIP Kemenperin - Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
3	<i>Internal Process Perspective</i> Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	INSPEKTORAT I, II, III, IV: Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I, II, III, IV SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL - Pelaksanaan penelaahan sejawat INSPEKTORAT I, II, III, IV: - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV Capaian ACM Inspektorat Jenderal Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)
4	<i>Learn and Growth Perspective</i> Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif Dan Efisien	Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh Auditor	10%	Pengembangan sistem informasi pengawasan dan sinkronisasi dengan sistem Pusdatin

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
		Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas - Tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal - Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan peraturan di bidang pengawasan - Penyusunan peta proses bisnis Inspektorat Jenderal berlaku
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	<p>SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi program pengawasan - Penyusunan kebijakan pengawasan - Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal - Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi <p>INSPEKTORAT I, II, III, IV</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Program Kerja dan Anggaran - Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas - Koordinasi peran pengawasan lainnya cakupan tugas Inspektorat I, II, III, IV
		Tingkat perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan website Inspektorat Jenderal - Pemutakhiran data dan informasi pengawasan - Pengelolaan informasi pengawasan
		Tingkat kesesuaian penggunaan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Analisa beban kerja - Penyusunan Perencanaan pengembangan Kompetensi SDM di lingkungan Inspektorat Jenderal
	Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal			<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal - Aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian
5	Terwujudnya APIP yang	Sharing Knowledge	50%	<ul style="list-style-type: none"> - Sharing knowledge di lingkungan Inspektorat Jenderal

NO	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN
	profesional dan berintegritas	atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan		<ul style="list-style-type: none"> - Assessment kompetensi pegawai ijen - Penyusunan kebutuhan diklat - Koordinasi pelaksanaan diklat dengan BPSDMI - Penilaian angka kredit - Evaluasi prestasi kerja pegawai - Fasilitasi Pelaksanaan Pemantauan kode etik auditor - Koordinasi pelaksanaan pelayanan, bantuan, dan konsultasi hukum di bidang pengawasan

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Sampai dengan periode Triwulan II Tahun 2020 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi anggaran sebanyak (2) dua kali. Revisi pertama dilakukan tanggal 8 April 2020 dengan merevisi komponen dan tidak ada pergeseran anggaran antar output. Kemudian revisi kedua dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang langkah-langkah penyesuaian belanja Kementerian/Lembaga TA 2020 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020. Revisi tersebut mengakibatkan penurunan anggaran sebesar 39,44% atau sebesar 19.612.608.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Perubahan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020

No	Unit	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	Inspektorat I	3.400.000.000	1.715.273.000	1.684.727.000
2	Inspektorat II	3.438.717.000	1.210.901.000	2.227.816.000
3	Inspektorat III	3.373.590.000	1.326.813.000	2.046.777.000
4	Inspektorat IV	3.421.785.000	1.042.108.000	2.379.677.000
5	Ses Itjen	36.089.938.000	24.816.327.000	11.273.611.000
TOTAL		49.724.030.000	30.111.422.000	19.612.608.000

Dengan adanya penurunan anggaran ini, menyebabkan adanya penurunan output pada Inspektorat I, III, dan IV, yaitu output Monitoring & Evaluasi, antara lain:

- a. Inspektorat I : Monev pelaksanaan diklat sistem 3 in 1;
- b. Inspektorat III : Monev Kapabilitas Balai Besar dan Baristand dalam mendukung Industri 4.0 (prioritas dalam bidang tekstil); dan
- c. Inspektorat IV : Monev Kebijakan Industri Garam, Monev kebijakan gula rafinasi Industri Agro

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW II tahun 2020 :

Tabel 5. Realisasi fisik dan keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2020

Jenis Kegiatan	Target Fisik (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Triwulan II			Realisasi s.d. Triwulan II (%)	%	Sisa Anggaran s.d. Triwulan II (Rp.)	%	
			Realisasi Fisik	Keuangan (Rp.)	%					
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	72.30	1,715,273,000	18.20	183,467,300	10.69	45.75	951,201,168	55.45	764,071,832	44.55
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	51.65	1,210,901,000	30.91	69,269,800	5.72	44.36	398,313,902	32.89	812,587,098	67.11
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	43.73	1,326,813,000	42.52	57,458,320	4.33	50.75	550,736,893	41.51	776,076,107	58.49
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	59.65	1,055,308,000	44.49	124,250,534	11.77	47.80	172,097,852	16.31	883,210,148	83.69
Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	42.76	24,803,127,000	21.04	6,198,347,679	24.99	36.72	10,422,172,608	42.02	14,380,954,392	57.98
T O T A L	54.02	30,111,422,000	31.43	6,632,793,633	22.02	45.08	12,494,522,423	41.49	17,616,899,577	58.51

Capaian tersebut dihitung dari capaian pelaksanaan kegiatan masing-masing dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan.

III.2. Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada triwulan II Tahun 2020 diperoleh melalui pencapaian pelaksanaan kegiatan masing-masing Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal. Adanya pandemi COVID-19, yang mengharuskan seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada di Indonesia melakukan revisi anggaran yang berdampak berdampak pada pelaksanaan kegiatan mulai triwulan II tahun 2020.

Revisi anggaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dilakukan dengan berdasarkan pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor B-460/SJ-IND/KU/IV/2020 tanggal 17 April 2020 perihal Perubahan Terkait Revisi DIPA Penghematan Kementerian Perindustrian Dalam APBN-P Tahun 2020 sebagai tindak lanjut lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Inspektorat Jenderal telah mengajukan revisi anggaran ke Direktorat Jenderal Anggaran di bawah koordinasi Biro Perencanaan. Revisi ini menyebabkan anggaran Inspektorat Jenderal turun sebesar 39,44% atau sebesar Rp19.612.608.000,- dengan rincian untuk masing-masing eselon II sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Revisi Anggaran Inspektorat Jenderal

No	Unit	Sebelum	Sesudah	Selisih
1	Inspektorat I	3.400.000.000	1.715.273.000	1.684.727.000
2	Inspektorat II	3.438.717.000	1.210.901.000	2.227.816.000
3	Inspektorat III	3.373.590.000	1.326.813.000	2.046.777.000
4	Inspektorat IV	3.421.785.000	1.042.108.000	2.379.677.000
5	Ses Itjen	36.089.938.000	24.816.327.000	11.273.611.000
TOTAL		49.724.030.000	30.111.422.000	19.612.608.000

Revisi ini menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan pada beberapa kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran. Hampir seluruh kegiatan yang direncanakan pada triwulan II (audit, evaluasi WUB, evaluasi hibah, reviu PAPBJ, evaluasi SAKIP unit eselon II, capacity building) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena seluruh Inspektorat fokus pada pelaksanaan reviu realokasi anggaran satker cakupan tugas masing-masing.

Dengan adanya kondisi baru, kegiatan Inspektorat Jenderal yang dapat terlaksana pada Triwulan II (April-Juni) yaitu:

1. Kegitan Pengawasan

Adanya kebijakan penghematan anggaran dalam menyikapi pandemik COVID-19, berdampak pada kegiatan Inspektorat Jenderal. Yang semula dijadwalkan melakukan audit beralih ke reviu pemotongan anggaran pada satuan kerja cakupan tugas.

Sementara itu, beberapa kegiatan audit yang sudah direncanakan dan tertuang dalam dokumen PKPT harus dibatalkan. Kegiatan audit yang tetap terlaksana dan dilakukan secara daring, yaitu pada Ditjen ILMATE, Ditjen KPAII, serta tahap klarifikasi pada Ditjen Industri Agro.

Selain kegiatan reviu dan audit, juga telah dilaksanakan tindak lanjut persiapan kegiatan Hannover Messe 2021, serta penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP). PMPP di lingkungan Kementerian Perindustrian dikoordinasikan oleh Biro Keuangan dan akan direviu oleh BPKP. Selain itu, Inspektorat III telah melaksanakan kegiatan pengawalan realisasi capaian kinerja dan kegiatan beresiko pada BBIA Bogor. Kegiatan serupa pada B4T, BBLM, BBT, BBK, BBPK masih berlangsung sampai dengan saat ini dan dijadwalkan selesai pada 11 Juli 2020.

2. Evaluasi SAKIP Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal

Telah dilaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Unit Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tanggal 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2020 dengan hasil sebagai berikut:

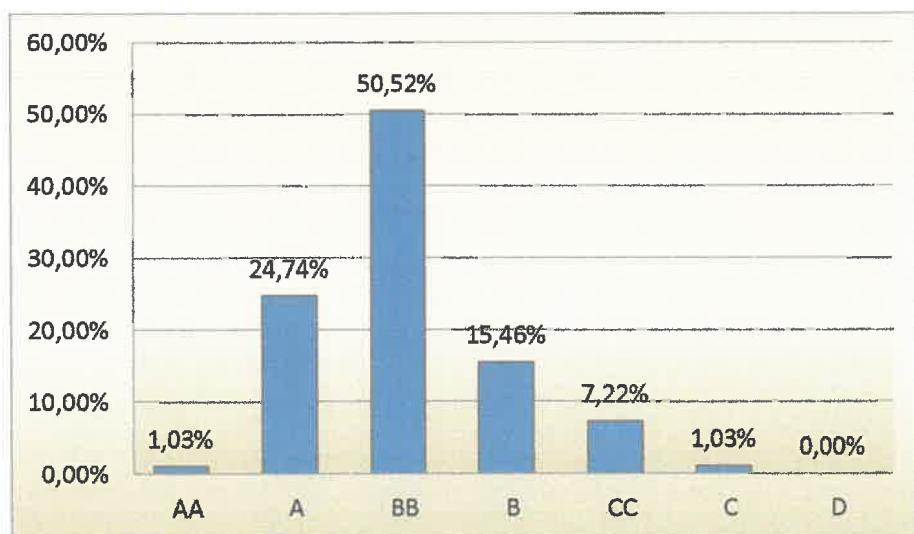
Tabel 7. Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal

No	Unit Eselon II	KOMPONEN					Nilai	Nilai Tahun 2019
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran/Kinerja (20%)		
1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	23,07	19,06	11,98	7,90	14,58	76,59 (BB)	81,12 (A)
2	Inspektorat 1	21,38	19,69	11,62	7,90	11,13	71,72 (BB)	79,03 (BB)

No	Unit Eselon II	KOMPONEN					Nilai	Nilai Tahun 2019
		Perencanaan Kinerja (30%)	Pengukuran Kinerja (25%)	Pelaporan Kinerja (15%)	Evaluasi Kinerja (10%)	Pencapaian Sasaran/Kinerja (20%)		
3	Inspektorat 2	21,44	19,69	11,71	7,90	12,78	73,52 (BB)	79,97 (BB)
4	Inspektorat 3	21,16	19,38	11,71	7,90	13,91	74,06 (BB)	79,39 (BB)
5	Inspektorat 4	22,06	20,00	9,97	7,90	10,35	70,28 (BB)	79,46 (BB)

3. Evaluasi SAKIP Unit Eselon II dan UPT di lingkungan Kementerian Perindustrian

Pada bulan Juni ini, masing-masing Inspektorat juga telah melaksanakan Evaluasi SAKIP terhadap unit cakupan tugasnya. Berdasarkan hasil dari evaluasi atas implementasi SAKIP 2019 Unit Eselon II dan UPT, nilai tertinggi diraih oleh Biro Perencanaan dengan nilai 90,52 (Kategori AA). Kemudian nilai tertinggi kedua dengan nilai 84,93 (kategori A) adalah Baristand Pontianak. Dan nilai tertinggi ketiga diperoleh Unit Sekretariat BPIPI dengan nilai 84,62 (kategori A). Secara ringkas, hasil penilaian SAKIP Eselon II & UPT dapat dilihat sebagai berikut:



Dari total 97 Unit Eselon II dan UPT yang dinilai, hanya ada 1 unit yang mendapatkan nilai AA yang berarti Sangat memuaskan yaitu Biro Perencanaan. Terdapat 24 unit yang mendapatkan nilai A yang artinya memuaskan, 49 unit yang

mendapatkan nilai BB yang berarti sangat baik, dan 15 unit yang mendapat kategori nilai B yang berarti Baik. Terdapat 7 unit yang memperoleh kategori CC yang berarti cukup (memadai), dan terdapat 1 unit yang mendapatkan nilai C yang berarti Kurang, yaitu Unit Puslitbang Industri IKFTLMATE.

Berdasarkan data penilaian, dapat diperoleh rata-rata nilai yang didapatkan pergelongan satuan kerja sebagai berikut:

- a. Unit Eselon II (Pusat) memperoleh rata-rata nilai 71,06;
- b. Unit Pendidikan dengan rata-rata nilai 69,83;
- c. UPT BDI dengan nilai rata-rata 74,88;
- d. UPT Baristand dengan rata-rata nilai 79,11;
- e. UPT Balai Besar rata-rata nilainya adalah 81,60.

4. Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Inspektorat Jenderal

Pada tanggal 8 s.d. 11 Juni 2020 telah dilakukan Panel Kedua Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pada tahap ini diperoleh nilai Inspektorat Jenderal mencapai 13,36 dari total nilai 14,6. Namun nilai yang diperoleh tersebut belum sepenuhnya dilengkapi dengan bukti/dokumen pendukung yang memadai, yang artinya masih ada kemungkinan penurunan nilai.

Dari hasil tersebut, terdapat *area of improvement* yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, yaitu: penyusunan rencana aksi *agent of change*, monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik, monev pencapaian kinerja individu yang dilakukan secara berkala, mekanisme pemberian *reward and punishment*, reviu perbaikan standar pelayanan yang melibatkan *stakeholders* dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

Kemudian dalam rangka memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi telah menyampaikan Formulir Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 untuk diisi oleh para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian untuk dilengkapi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dan/atau tanggung jawab dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Tahun 2020. Hasil pemantauan dan evaluasi masih dalam proses pelaksanaan.

5. Penilaian Mandiri Penerapan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Masing-masing area perubahan di di lingkungan Inspektorat Jenderal telah mengunggah dokumen/data dukung pada intranew. Namun berdasarkan Quality Assurance auditor dan berdasarkan rapat pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, perlu mengunggah beberapa data dukung tambahan agar masing-masing area memperoleh nilai maksimal.

Semua Unit eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menyelesaikan panel PMPRB tahap I. Dari hasil panel tersebut, yang dilaksanakan pada masa WFH pada tanggal 12 s.d. 15 Mei 2020, menunjukkan bahwa data dan dokumen yang diperlukan dalam penilaian belum lengkap sehingga nilai yang diperoleh belum maksimal. Kemudian menindaklanjuti surat KeMENPAN&RB no. 56 tahun 2020 maka penyampaian dokumen diperpanjang menjadi tanggal 30 Juni 2020.

Sesuai dengan surat Inspektur Jenderal Nomor 139/IJ-IND/PW/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, panel tahap II akan dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 11 Juni 2020. Diharapkan pada panel tahap II semua dokumen pendukung telah dilengkapi oleh masing-masing satuan kerja unit eselon I maupun tingkat pusat. Unit Sekretariat Jenderal akan menjadi *pilot project* untuk integrasi LKE ke intranew dengan aplikasi PMPRB 2020 KeMENPAN&RB.

6. Penyusunan Anggaran 2021

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor: B/143/SJ-IND/KU/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 Perihal Pagu Indikatif Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2021, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal Tahun 2021 sebesar Rp40.643.630.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai : Rp. 19.779.464.000;
- b. Belanja Operasional : Rp. 5.327.780.000;
- c. Belanja Non-Operasional : Rp. 15.536.386.000.

Adapun alokasi anggaran untuk masing-masing Eselon II sesuai dengan Nota Dinas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Inspektorat I : Rp. 2.000.000.000,-;
- b. Inspektorat II : Rp. 2.000.000.000,-;
- c. Inspektorat III : Rp. 2.000.000.000,-;
- d. Inspektorat IV : Rp. 2.000.000.000,-;
- e. Sekretariat Inspektorat Jenderal : Rp. 7.536.386.000,-.

Sekretaris Inspektorat Jenderal telah menyampaikan Nota Dinas Nomor 440/IJ-IND.1/PR/V/2020 tanggal 21 Mei 2020 yang ditujukan ke Para Inspektur, Para Kepala Bagian dan Sub Bagian untuk menyusun KAK dan RAB Tahun 2021 yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Anggaran tahun 2021 akan difokuskan pada Audit terhadap pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Perindustrian dan implementasi Industry 4.0 Tahun Anggaran 2020, Pengawalan pelaksanaan Program Prioritas Kementerian Perindustrian dan implementasi Industry 4.0 Tahun Anggaran 2021, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (Reviu RKAKL) Tahun Anggaran 2022, Reviu Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2020, sedangkan untuk Reviu Laporan Keuangan Semester I dilakukan bersamaan dengan konsolidasi Laporan Keuangan, reviu PIPK, audit khusus, pengembangan Sumber Daya Manusia dan peningkatan level IACM.

7. Revisi Anggaran

Dokumen Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Inspektorat Jenderal Revisi 2 Tahun 2020 telah disampaikan sesuai surat Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 431/IJ-IND.1/PR/V/2020 tanggal 14 Mei 2020. Dalam dokumen POK disebutkan bahwa pagu anggaran untuk Inspektorat Jenderal Tahun 2020 sebesar Rp30.111.422.000,- untuk seluruh unit eselon II.

8. Penyusunan Renstra

Rapat koordinasi terkait penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perindustrian telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2020. Untuk selanjutnya akan disusun Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024.

Adanya perubahan pada dokumen rencana strategis ini menyebabkan adanya penyesuaian pelaksanaan pada beberapa kegiatan Inspektorat Jenderal yang telah direncanakan pada awal tahun anggaran dan menyebabkan potensi perubahan indikator dan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Indikator kinerja yang berpotensi mengalami perubahan antara lain :

- a. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin;

- b. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan;
- c. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat;
- d. *Sharing Knowledge* atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan;
- e. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor.

Perubahan indikator dan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja akan dilakukan segera setelah dilakukan penyesuaian indikator pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal.

9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Refocussing Anggaran

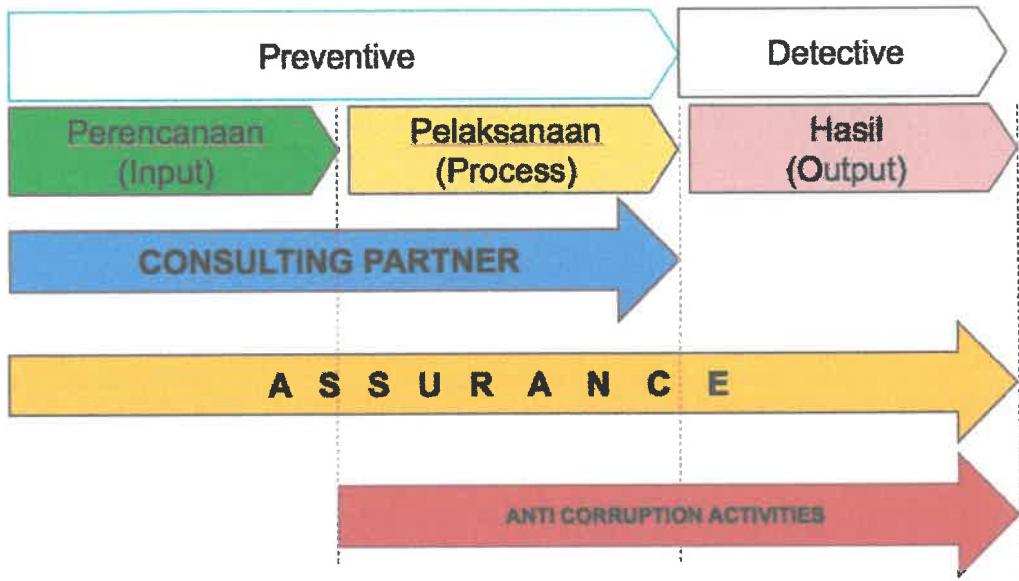
Dengan diberlakukannya *New Normal* khususnya di lingkungan Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kegiatan pada semester II harus tetap menjaga ketercapaian output sebagaimana yang telah direncanakan pada saat revisi anggaran ke-2, dengan tetap memberlakukan aturan *WFO* dan *WFH*.

10. Penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahun 2021

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2021 telah mulai dirumuskan pada triwulan II tahun 2020. Menurut arahan Inspektur Jenderal, kebijakan pengawasan harus mampu mengawal kebijakan pembangunan industri yang akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian pada tahun 2021 yang akan difokuskan pada dua hal, yaitu substitusi impor dan relaksasi kebijakan di sektor industri yang dilakukan dalam rangka pemulihan industri dalam negeri pasca COVID-19 melalui berbagai kegiatan antara lain bantuan-bantuan kepada industri, kemudahan-kemudahan perijinan dan sebagainya.

Mengingat besarnya anggaran untuk pemulihan industri tersebut, maka Inspektorat Jenderal harus melakukan pengawalan secara memadai, mulai dari tahap perencanaan kegiatan, pelaksanaan, maupun pelaporan/pasca pelaksanaan kegiatan, dengan ilustrasi sebagai berikut:



Oleh karena itu, konsep kebijakan pengawasan nantinya akan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. **Arah Kebijakan**

Tercapainya Target Kementerian Perindustrian Sesuai RIPIN, RPJMN, serta Renstra.

b. **Sasaran Kebijakan :**

- 1) Mengawali kegiatan Prioritas Nasional Kementerian Perindustrian dalam pemulihan industri pasca Covid-19 secara efektif dan efisien;
- 2) Meningkatkan Efektivitas Manajemen Risiko dalam pelaksanaan program/ kegiatan;
- 3) Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program/ kegiatan di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 4) Peningkatan peran pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola pemerintahan;
- 5) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

c. **Strategi Pengawasan**

- 1) Pengawasan *Preventive*;
- 2) Pengawasan *Detective*.

Jenis Strategi	Preventive	Defensive
Pengertian	Pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana (<i>Assurance & Consulting</i>)	Pengawasan yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen Pelaksanaan Kegiatan/Anggaran (<i>Assurance</i>)
Sifat	Antisipatif (pencegahan)	Represif (penindakan dan korektif)
Kegiatan	<p>I. Mandatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu RKAKL 2. Reviu LK/BMN/PIPK 3. Pengendalian Tipikor 4. Monitoring Penyerapan Anggaran <p>II. Non Mandatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawalan Kegiatan Prioritas 2. Consulting Manajemen Risiko 3. Kajian Isu Aktual 4. Pendampingan Pemeriksaan Eksternal 	<p>I. Mandatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi TataKejola Pemerintahan (ZI, PMPRB, SAKIP) 2. Pengawasan Kegiatan Konkuren <p>II. Non Mandatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit 2. Monev 3. Pemantauan TLHP

- d. Untuk Kegiatan Dukungan Pengawasan, akan difokuskan kepada perbaikan Internal Audit Capability Model (IACM), dengan urutan prioritas sebagai berikut:
- 1) Pengembangan SDM Pengawasan;
 - 2) Evaluasi IACM;
 - 3) Pengelolaan data pengawasan
 - 4) Kelengkapan Organisasi Pengawasan;
 - 5) Keikutsertaan Agenda AAUPI;
 - 6) Penyediaan Sarana dan Prasarana;
 - 7) Pengembangan SIP;
 - 8) Dukungan Manajemen Lainnya.

11. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)

Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Nomor 181/IJ-IND/PW/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 perihal Pengajuan UPT menuju WBK/WBBM tahun 2020, tim penilai Zona Integritas (ZI) akan melakukan evaluasi terhadap kesinambungan pembangunan ZI pada 17 (tujuh belas) Unit Pelayanan Teknis (UPT) di lingkungan BPSDMI, BPPI dan Ditjen IKMA yang telah mendapatkan predikat WBK dan WBBM.

Terkait hal tersebut, pada tanggal 29 s/d 30 Juni 2020 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2020.

12. Kuesioner Survei BPKP SI EPAN JAVA

Sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA), salah satu tugas BPKP adalah melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan seluruh Jabatan Fungsional untuk meyakinkan bahwa APIP K/L telah mengelola JFA dengan baik. Sebagai langkah dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPKP mengadakan survei persepsi profesionalisme auditor yang ditujukan untuk para auditor utama, auditor madya, auditor pertama. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi, dan saat ini masih dalam tahap pengumpulan data.

Inspektorat Jenderal dapat berkoordinasi dengan BPKP terkait hasil survei ini, sehingga dapat melakukan evaluasi atas pengelolaan JFA serta mengetahui persepsi auditi atas etika, kompetensi, standar dan kualitas auditor dalam melaksanakan tugasnya.

13. Penyusunan Peraturan

Terkait dengan penyusunan peraturan-peraturan di lingkungan Inspektorat Jenderal sampai dengan bulan Juni 2020 dapat dilaporkan sebagai berikut:

- a. Inspektur Jenderal telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal sesuai surat Nomor 166/IJ-IND/HK/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Rancangan Permenperin Tentang Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
- b. Telah disusun beberapa konsep Peraturan, yaitu Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Internal, Peraturan Inspektur Jenderal tentang Telaah Sejawat Eksternal, Peraturan Inspektur Jenderal tentang Kendali Mutu Pengawasan, dan Peraturan Inspektur Jenderal tentang Kode Etik Pegawai

Inspektorat Jenderal. Keempat peraturan tersebut rencana akan difinalisasikan pada bulan Juli dan September 2020;

Kemudian, dalam menyikapi kebijakan pemerintah yang mulai mencanangkan *New Normal* dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru yang berlaku pada tanggal 5 Juni 2020 yang juga berlaku di Lingkungan Kementerian Perindustrian, khususnya Inspektorat Jenderal. Komposisi pegawai yang *Work from office* (WFO) dan WFH yaitu 50:50. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Jenderal telah melakukan rapat koordinasi dalam rangka melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan. Strategi pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan ini dimaksudkan untuk menjaga agar output kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dapat terpenuhi sesuai target dengan menggunakan anggaran yang telah dirampingkan melalui revisi anggaran. Bukti nyata dalam strategi pelaksanaan yang dilakukan Inspektorat Jenderal yaitu:

1. Meniadakan cek fisik ke satuan kerja yang berada diluar kota, maka satuan kerja yang bersangkutan harus mengirim foto kegiatan kepada auditor.
2. Mengalihkan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk rapat koordinasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) secara virtual melalui aplikasi zoom.
3. Meniadakan *capacity building* dan diganti dengan PKS.
4. Melakukan Evaluasi SAKIP Eselon I & II melalui virtual interaction (pengumpulan data melalui email, *Whatsapp chat*, *zoom meeting*).

Adapun progres capaian rencana aksi Triwulan II disajikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Progres Capaian Rencana Aksi TW II

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)KU	1.5%	- Pelaksanaan reviu laporan keuangan dan BMN Satuan kerja, Audit Kinerja Unit Pusat & Vertikal, Audit tematik sesuai kebijakan pengawasan pada IR I, II, III, IV belum dapat diukur, BPK belum selesai melakukan pemeriksaan.		
2.	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	10 %		- Pembinaan dan pengawasan IR I, II, III, IV belum dapat diukur, pelaksanaan di Triwulan III		
3.	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	80%		- Pelaksanaan audit internal, pelaksanaan audit khusus, pembinaan dan pengawasan kinerja dan keuangan (Capaian belum dapat diukur, pelaksanaan di Triwulan II)	- Telah dilaksanakan pelayanan klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal TW II	
4.	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	91%		- IR I, II, III, IV belum dapat diukur, pelaksanaan di Triwulan II	- Penyerahan dokumen TLHP ke BPK tahap kedua, tahap pertama sudah sudah dikirimkan tanggal 11 Juni 2020	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - Penyerahan menunggu hasil verifikasi BPK - Pembahasan tindak lanjut audit kinerja BPK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan PMPRB telah dilaksanakan panel I, II dan III - Pada panel III nilai yang keluar adalah nilai final yang akan dikirimkan ke Menpan RB disertai dengan penandatanganan berita acara konsensus hasil penilaian 	
	1. Peningkattan nilai RB area pengawasan	70%		<ul style="list-style-type: none"> - Belum dapat diukur 		
	2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik					
	2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	Level 3		<ul style="list-style-type: none"> - IR I, II, III, IV belum dapat diukur - Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan II 	<ul style="list-style-type: none"> - 	
	3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	<ul style="list-style-type: none"> - IR I: 15,30% ; Satker yang di audit telah memenuhi standar - IR II: Belum dapat diukur 	<ul style="list-style-type: none"> - Ses: Belum dilaksanakan, rencana diliaksanakan di TW III 	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - IR III: reviu PIPK dan reviu LK-BMN satker cakupan tugas, dan audit BPPI Pusat (20%) - IR IV: 100% telah tercapai; Seluruh pelaksanaan pengawasan telah sesuai dengan standar pelaksanaan pengawasan. 		
	2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	Level 3 IACM	- Koordinasi dalam dengan Unit Eselon II di Lingkungan Inspektorat Jenderal telah dilakukan untuk membahas penanggung jawab masing-masing aspek	(Capaian belum dapat diukur)		

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Keterangan
3.	Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	76%	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang dilakukan setiap pelaksanaan kegiatan - IR I: Belum dapat diukur <ul style="list-style-type: none"> - IR II: 1 Kegiatan audit dari 4 kegiatan telah dilaksanakan (25%) - IR III: 20% 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang dilakukan setiap pelaksanaan ini belum dapat diukur capaiannya 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan yang dilakukan setiap pelaksanaan ini belum dapat diukur capaiannya 	
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1.	<ul style="list-style-type: none"> Sistem informasi pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh 	10%	<ul style="list-style-type: none"> - Belum dapat diukur 	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Keterangan
	Auditor					
2.	Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50%	Telah disusun konsep Permenperin tentang evaluasi SAKIP dan sedang dibahas dengan Biro Hukum (capaian belum dapat diukur)	- Penilaian mandiri RB Itjen (Pengkoordinasian pemenuhan dokumen/bukti dukung PMPRB Tahun 2020) - Penyusunan draft pedoman kendali mutu pengawasan - Penyusunan draft pedoman telah sejauh intern.	- Rencana Kinerja 2021 sebesar 70%, Restrukturisasi Anggaran - Pagu indikatif baru dimulai	
3.	Tingkat Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	- IR I: 25% ; Reviu LKBMN, PIPK, Audit Kinerja satker Pusat (Set Itjen) & Audit Vertikal 8 satker	- IR II: 21,7% yaitu 5 dari 23 jenis kegiatan Inspektorat II sesuai dengan PKPT - IR III: 20,82% - IR IV: 100%(Telah tercapai); Dari seluruh Penugasan		

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Keterangan
				yang telah dijalankan oleh Inspektorat IV pada TW I, seluruh SDM telah menjalankan tugas sesuai dengan peran yang seharusnya		
4.	Tingkat Perolehan data dan informasi pengawasan yang memadai	80%	Penyediaan data dan informasi terkait pengawasan belum dapat diukur capaiannya	- Website tidak dapat diakses		
5.	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	- IIR I: 25%; Reviu LKBMN, PIPK, Audit Kinerja satker Pusat (Set Itjen) & Audit Vertikal 8 satker - IIR II: 21,7% yaitu 5 dari 23 jenis kegiatan Inspektorat II sesuai dengan PKPT - IIR III: 20%	-		

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Keterangan
				- IIR IV: 55%; Dari 20 Rencana Penugasan sesuai dengan PKPT 2020, terdapat 11 penugasan yang sesuai dengan PKPT, dan 9 yang tidak sesuai.		
5.	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50 %	Pelaksanaan PKS atas keikutsertaan diklat substansi Reviu PIPK, terdapat 50 orang peserta	- Belum dilaksanakan	
	6. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Inspektorat Jenderal	90%	Belum dapat diukur	-		

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Capaian TW II	Keterangan
	3. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90%	-	-	-	Auditor Madya
	4. Layanan Perkantoran	12 bulan layanan	- Pemberian Gaji dan Tunjangan telah dilaksanakan setiap bulannya dari Januari-Maret 2020	- Pemberian Gaji dan Tunjangan telah dilaksanakan setiap bulannya dari April-Juni 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Gaji dan Tunjangan telah dilaksanakan setiap bulannya dari April-Juni 2020 - Pelaksanaan Pembinaan Operasional dan Pemeliharaan kantor TW I 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Gaji dan Tunjangan telah dilaksanakan setiap bulannya dari April-Juni 2020 - Pelaksanaan Pembinaan Operasional dan Pemeliharaan kantor TW I

Keterangan :



: Telah tercapai



: Dalam proses pelaksanaan



: Tidak tercapai

III.3. Hambatan dan Kendala

Pada Triwulan II Tahun 2020, terdapat beberapa *output* (keluaran) Inspektorat Jenderal yang belum sesuai dengan target yang ditentukan. Hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Pandemi Covid-19 mengakibatkan operasional perkantoran berjalan efektif hanya sampai tanggal 13 Maret 2020. Tanggal 16 Maret 2020 telah dikeluarkan kebijakan untuk *work from home* bagi ASN dan PPNPN. Namun, di awal Juni dikeluarkan surat edaran 50% pegawai bekerja di kantor (*Work From Office*) dan 50% pegawai bekerja di rumah (*Work From Home*). Hal ini sedikit memberikan kendala dalam pelaksanaan beberapa kegiatan;
2. Beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya revisi kegiatan dan anggaran.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, serta dalam rangka menjadi ketercapaian output Tahun Anggaran 2020, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meniadakan kegiatan cek fisik ke satuan kerja yang berada diluar kota, sebagai alternatifnya, satuan kerja yang bersangkutan harus mengirim foto kegiatan kepada auditor;
2. Mengalihkan sebagian anggaran perjalanan dinas untuk rapat koordinasi, *Focus Group Discussion* (FGD), Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) secara virtual melalui aplikasi zoom;
3. Terkait dengan pemotongan anggaran pada beberapa kegiatan, masing-masing penanggung jawab pada Inspektorat agar segera menjadwalkan ulang kegiatan sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Tahun 2020 tetap terselenggara dengan baik.

BAB IV PENUTUP

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 (Januari-Juni) mencapai Rp 12,494,522,423,- atau 41.49 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 30,111,422,000,-. Angka-angka capaian kinerja kegiatan tersebut merupakan nilai tertimbang dari kemampuan penyerapan anggaran dan pencapaian realisasi fisik dari total anggaran yang ada pada Inspektorat Jenderal.

Untuk selanjutnya perlu koordinasi internal maupun eksternal untuk menjamin realisasi anggaran dan kegiatan sesuai dengan target.

Diharapkan, Informasi capaian kinerja Triwulan II ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pemantauan dan evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan, agar target kinerja yang dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN FORM A



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
(Aplikasi Form A)**
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006)

FORMULIR A**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL****I. DATA UMUM**

1. Nama Kode dan Nama Unit Organisasi
2. Nama Kode dan Nama Fungsi
3. Nama Kode dan Nama Sub Fungsi
4. Nama Kode dan Nama Program
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke Penanggung Jawab Kegiatan
8. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan Pengawasan Kegiatan
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA

(247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

04. Ekonomi

04.07. Industri Dan Konstruksi

04.07.03. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian

5. Indikator Hasil

1845 - Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat

1/1

Ir. Liliek Widodo, MSi

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 4

SP DIPA- 019.06.1.247885/2020

II. DATA KELUARAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		2	3	4		
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I			-	2,932,744	2,932,744	7
2. Layanan Sistiana dan Prasarana Internal			-	105,000	105,000	1 Layanan
3. Layanan Parkantoran			-	21,765,383	21,765,383	12 Layanan
Total			-	24,803,127	24,803,127	

III. TARGET IIAAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)						Triwulan Ini (%)						S.D. Triwulan ini (%)						Lokasi Kegiatan	
	Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik			Keuangan			Fisik				
	S	R	S	S	R	Fisik	S	R	S	S	R	Fisik	S	R	S	S	R	Fisik		
1	2	3	4	5	5		6	7	8	9	9		10	11	11	12	13	14		
950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12.44	26.34	12.91	12.61	1.95	16.47	6.61	8.13	14.39	42.81	19.52	20.74	DKI JAKARTA							
951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DKI JAKARTA	
991 Layanan Perkantoran	17.92	14.99	19.53	23.43	20.21	20.17	19.53	15.62	38.13	35.16	39.05	39.05	DKI JAKARTA							
Jumlah	17.19	16.27	18.66	22.05	17.97	19.65	17.92	14.67	35.16	35.91	36.58	36.72								

IV. KENDALA DALAM LAKUKAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Dipertukar	Pihak yang Diharapkan Dapat Memberantus Penyelesaian Masalah
1	2	3 <p>1. Proses evaluasi implementasi SAKIP Eselon II yang telah dilaksanakan, belum semua Inspektorat menyampaikan LHE beserta kelengkапannya ke satuan kerja cakupan tugasnya;</p> <p>2. Beberapa anggaran Kegiatan dialokasikan pada kegiatan percepatan penanganan COVID-19 untuk dapat menjaga ketercapaian output pada akhir tahun</p>	4	5

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Jakarta Selatan,

Juli 2020

Ir. Liliek Widowidjo, M.Si



Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

Penetapan Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan Pendukung
1.	S1 - Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1.2 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU Target = 91 persen	- 053.AA Koordinasi dalam rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut [Lepas] - 053.AD Temu Teknis Penyuluhan / Pemutakhiran Data Tindak Lanjut [Lepas] - 053.AE Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi dan Reviu Inspektorat Jenderal [Lepas] - 053.AF. Rapat Koordinasi Pengawasan [Lepas] - 053.CA Bimbingan dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/Evaluasi Hasil Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian [Lepas]
2.	S2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S1.1 - Pengaduan masyarakat berdasarkan pengawasan yang ditindaklanjuti 80 Persen	<p><i>Input Kegiatan >></i></p> <ul style="list-style-type: none">- 056.I Pembinaan dan Pengawasan Aspek Kepegawaian dan Hukum di Lingkungan Kementerian Perindustrian [Lepas]- 056.D Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan [Lepas] <p><i>Input Indikator >></i></p> <p>S2.1 - Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan *) IKU Target = 70 Persen</p> <p><i>Input Kegiatan >></i></p> <ul style="list-style-type: none">- 061.D Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian(PMPRB) [Lepas]- 061.E Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas dalam rangka mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian [Lepas]- 061.A Pelaksanaan pemenuhan aksi pencegahan korupsi di Lingkungan Kementerian Perindustrian [Lepas] <p><i>Input Kegiatan >></i></p> <p>S2.2 - Indeks Penerapan Manajemen Risiko *) IKU</p> <p><i>Input Kegiatan >></i></p> <p>3 Level</p> <p><i>Input Indikator >></i></p> <p>S3.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan</p> <p>Target = 75 Persen</p> <p><i>Input Kegiatan >></i></p> <ul style="list-style-type: none">- 052.B Pelaksanaan Penerapan Standart [Lepas] <p><i>Input Kegiatan >></i></p> <p>S3.2 - Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU</p> <p>3 Level</p> <ul style="list-style-type: none">- 052.A Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja [Lepas]- 052.C Penyusunan dan Reviu SET ITJEN dan SET ITJEN [Lepas]
3.	S3 - Tersejenggaran Pengawasan Internal, Efisiensi, Efekur		

		- 052.E Reviu Perkin dan Renstra [Lepas]
		- 054.E Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan [Lepas]
<i>Input Kegiatan >></i>		
<i>Input Indikator >></i>		
4. S4 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	S4.1 - Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	- 060.C Penerbitan Majalah Solusi [Lepas]
	Target = 10 Persen	<i>Input Kegiatan >></i>
	S4.2 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundungan yang berlaku	- 056.A Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal [Lepas]
	50 Persen	<i>Input Kegiatan >></i>
	S4.3 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	- 051. A. Koordinasi Program Pengawasan [Lepas]
	70 Persen	- 051. C Penyusunan RKAKL Inspektorat Jenderal [Lepas]
		- 051.E Penyusunan PKPT Inspektorat Jenderal [Lepas]
		- 051.G Bimbingan dan Pengawasan aspek program di Lingkungan Kementerian Perindustrian [Lepas]
		- 052.B Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan [Lepas]
<i>Input Kegiatan >></i>		
	S4.4 - Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	- 060.B Pemutakhiran Data dan Informasi [Lepas]
	80 Persen	<i>Input Kegiatan >></i>
	S4.5 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	<i>Input Kegiatan >></i>
	80 Persen	
	S4.6 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	- 061.B Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal [Lepas]
	90 Persen	- 053.BE Penilaian SAKIP Eselon I [Lepas]
		- 053.BA Koordinasi Analisis dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan [Lepas]
		- 053.BB Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan terkait isu-isu aktual bidang industri [Lepas]
		- 053.BC Penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik [Lepas]
		- 053.BD Penyusunan Laporan APIP [Lepas]
<i>Input Kegiatan >></i>		
	<i>Input Indikator >></i>	
5. S5 - Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	S5.2 - Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	- 057.A Koordinasi Pengembangan SDM [Lepas]
	Target = 50 Persen	- 057.B Keikutsertaan Diklat Pengembangan SDM ITJEN [Lepas]
		- 057.F Pengawas dan Penerjau anggaran Kredit Jabatan fungsi, Auditor
		- 057.G Fasilitasi Bebas Masa Tugas Menjelang Pensiun PNS Inspektorat Jenderal [Lepas]
		- 057.E Koordinasi Pembinaan Kesiapan [Lepas]
<i>Input Kegiatan >></i>		

SS.1 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan diklat substansi dengan pesan

50 Persen

SS.3 - Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan auditor

90 Persen

SS.4 - Layanan Perkantoran

12 Layanan

- 057.D Pelatihan Di Kantor Sendiri [Lepas]

Input Kegiatan >>

- 056.C Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Bantuan dan Konsultasi Hukum di Bidang Pengawasan [Lepas]

Input Kegiatan >>

- 001.A Pembayaran Gaji dan Tunjangan [Lepas]

- 002.A Honorarium Operasional [Lepas]

- 002.B - Persediaan dan Perlengkapan Kantor [Lepas]

- 002.C - Biaya Langganan dan operasional perkantoran [Lepas]

- 002.D - Koordinasi dan layanan pimpinan [Lepas]

- 002.E - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional Kantor [Lepas]

- 052.A Peningkatan Fasilitas Perkantoran [Lepas]

- 060.E Perjalanan Dinas Pimpinan [Lepas]

- 058.F Pelayanan Umum dan Rapat Kedinasan [Lepas]

- 058.E Penataan dan Penghapusan Arsip/Dokumen Pengawasan dari Arsip Inaktif [Lepas]

- 058.D Koordinasi Dalam Rangka Penataan Ketatausahaan dan Kearsipan Inspektorat Jenderal [Lepas]

- 058.F. Percepatan penanganan dan antisipasi COVID 19 di lingkungan Inspektorat Jenderal [Lepas]

- 054.F Bimbingan dan Pengawasan Aspek Keuangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian [Lepas]

- 054.A Pelayanan Perbendaharaan [Lepas]

- 054.B Koordinasi dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan dan BMN [Lepas]

- 054.C Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN [Lepas]

Input Kegiatan >>

Input Indikator >>

Input Sasaran >>



Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

Monitoring Capaian		Sasaran & Indikator											
No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. S1 - Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
	S1.2 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91 persen	14%	9%	23%	19%	23%	0%	23%	0%	19%	16%	90 persen
	Pagu = Rp. 367.700.000												
	S1.1 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	90 Persen
	Pagu = Rp. 229.340.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 597.040.000												
2. S2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	S2.1 - Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan *) IKU	70 Persen	12%	12%	49%	49%	100%	0%	100%	0%	49%	10%	3 Persen
	Pagu = Rp. 121.000.000												
	S2.2 - Indeks Penerapan Manajemen Risiko *) IKU	3 Level	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 Level
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 121.000.000												
3. S3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	S3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	1 Persen
	Pagu = Rp. 33.225.000												
	S3.2 - Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	3 Level	65%	53%	78%	93%	91%	0%	100%	0%	93%	50%	1 Level
	Pagu = Rp. 154.370.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 187.595.000												
4. S4 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien													
	S4.1 - Sistem Informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	1 Persen
	Pagu = Rp. 153.220.000												
	S4.2 - Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku	50 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	0 Persen
	Pagu = Rp. 74.702.000												
	S4.3 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70 Persen	0%	1%	1%	1%	1%	0%	1%	0%	1%	44%	0 Persen
	Pagu = Rp. 591.370.000												
	S4.4 - Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	80 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79%	0 Persen
	Pagu = Rp. 12.526.000												
	S4.5 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan SDM pengawasan dengan kompetensi	85 Persen	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55%	0 Persen
	Pagu = Rp. 0												
	S4.6 - Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	85 Persen	16%	0%	22%	22%	91%	0%	96%	0%	22%	25%	1 Persen
	Pagu = Rp. 46.810.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 878.638.000												
5. S5 - Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas													
	S5.2 - Persentase APIP yang mendapatkan dilatih kompetensi/profesi sesuai rencana	85 Persen	55%	68%	75%	83%	87%	0%	100%	0%	83%	75%	0 Persen

kebutuhan diklat

Pagu = Rp. 285.380.000

S5.1 - Sharing Knowledge atas keikutsertaan
diklat substansi pengawasan

50 Persen	27%	61%	55%	61%	82%	0%	100%	0%	61%	61%	...
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----	------	----	-----	-----	-----

Pagu = Rp. 9.200.000

S5.3 - Tingkat kepatuhan terhadap kode etik

50 Persen	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95%	...
-----------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----

Pagu = Rp. 231.980.000

S5.4 - Layanan Perkantoran

12 Layanan	19%	23%	38%	38%	57%	0%	76%	0%	38%	38%	0 Layanan
------------	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	-----	-----------

Pagu = Rp. 22.492.294.000

Total Pagu Sasaran = Rp. 23.019.854.000

Total Pagu Keseluruhan = Rp. 24.803.127.000

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian



Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Setitjen TA 2019

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1845.950 - 053.af. Rapat Koordinasi Pengawasan	151.110.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	1845.950 - 057.f Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	101.600.000	99,83%	99,83%	100,00%	100,00%
3.	1845.950 - 057.e Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	64.400.000	96,84%	96,23%	58,33%	88,90%
4.	1845.950 - 057.d Pelatihan Di Kantor Sendiri	9.200.000	100,00%	60,87%	63,64%	61,00%
5.	1845.950 - 057.b Keikutsertaan Diklat Pengembangan Sdm Itjen	45.180.000	82,12%	82,12%	95,83%	95,00%
6.	1845.950 - 057.a Koordinasi Pengembangan Sdm Kepegawaian Dan Hukum Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	49.950.000	43,45%	28,84%	58,23%	50,00%
7.	1845.950 - 056.i Pembinaan Dan Pengawasan Aspek Kepegawaian Dan Hukum Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	207.200.000	0,00%	20,08%	0,00%	0,00%
8.	1845.950 - 056.g Pelaksanaan Penelitian Sejawat	33.225.000	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9.	1845.950 - 056.d Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan	22.140.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	1845.950 - 056.c Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan Dan Konsultasi Hukum Di Bidang Pengawasan	231.980.000	0,00%	56,07%	0,00%	0,00%
11.	1845.950 - 057.j Fasilitasi Bebas Masa Tugas Merjelang Pensiun Pns Inspektorat Jenderal	24.250.000	56,25%	43,75%	54,55%	43,00%
12.	1845.950 - 058.d Koordinasi Dalam Rangka Penataan Ketatausahaan Dan Kearsipan Inspektorat Jenderal	89.160.000	0,00%	27,98%	0,00%	0,00%
13.	1845.950 - 058.f. Percepatan Penanganan Dan Antisipasi Covid 19 Di Lingkungan Inspektorat Jenderal	96.000.000	0,00%	85,29%	0,00%	0,00%
14.	1845.950 - 061.e Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas Dalam Rangka Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	49.800.000	0,00%	3,46%	100,00%	20,00%
15.	1845.950 - 061.d Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian(pmprb)	71.200.000	0,00%	14,79%	90,00%	70,00%
16.	1845.950 - 061.b Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	2.070.000	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
17.	1845.950 - 060.e Perjalanan Dinas Pimpinan	211.200.000	0,00%	13,44%	0,00%	0,00%
18.	1845.950 - 060.c Penerbitan Majalah Solusi	153.220.000	0,00%	54,58%	0,00%	0,00%
19.	1845.950 - 060.b Pemutakhiran Data Dan Informasi	12.536.000	0,00%	79,37%	0,00%	0,00%
20.	1845.950 - 058.f Pelayanan Umum Dan Rapat Kedinasan	46.396.000	0,00%	79,53%	0,00%	0,00%
21.	1845.950 - 058.e Penataan Dan Penghapusan Arsip/dokumen Pengawasan Dari Arsip Inaktif	17.000.000	0,00%	5,59%	0,00%	0,00%
22.	1845.950 - 056.a Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal	74.702.000	0,00%	18,83%	0,00%	0,00%
23.	1845.950 - 054.f Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Keuangan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	11.850.000	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%
24.	1845.950 - 053.aa Koordinasi Dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	144.590.000	0,00%	11,11%	33,00%	23,00%
25.	1845.950 - 052.e Reviu Perkin Dan Renstra	5.725.000	0,00%	0,00%	28,57%	0,00%
26.	1845.950 - 052.c Penyusunan Dan Reviu Lapik Itjen Dan Sat Itjen	14.140.000	70,01%	70,01%	100,00%	100,00%
27.	1845.950 - 052.b Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan	7.450.000	53,37%	15,10%	66,67%	100,00%
28.	1845.950 - 052.a Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Kerja	125.365.000	68,09%	40,50%	85,00%	100,00%
29.	1845.950 - 051.g Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Program Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	272.000.000	0,00%	34,41%	0,00%	0,00%
30.	1845.950 - 051.e Penyusunan Rkpkt Inspektorat Jenderal	15.900.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31.	1845.950 - 051. C Penyusunan Rkakl Inspektorat Jenderal	12.900.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32.	1845.950 - 051. A Koordinasi Program Pengawasan	283.120.000	0,00%	58,75%	0,00%	0,00%
33.	1845.950 - 053.ad Temu Teknis Penyuluhan / Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	23.100.000	0,00%	14,12%	0,00%	0,00%
34.	1845.950 - 053.ae Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi Dan Reviu Inspektorat Jenderal	10.350.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35.	1845.950 - 053.ba Koordinasi Analisis Dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan	750.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
36.	1845.950 - 054.e Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keterbaca	5.140.000	71,12%	72,44%	55,00%	53,56%
37.	1845.950 - 053.ah Koordinasi Dan Synchronisasi Administrasi Keuangan Dalam Rangka	46.263.300	75,36%	—	58,33%	52,11%
38.	1845.950 - 053.aj Koordinasi dan Pengembangan Aspek Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	26.115.000	51,88%	—	56,33%	—
39.	1845.950 - 053.aj Koordinasi dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	56.300.000	0,00%	99,41%	100,00%	100,00%
40.	1845.950 - 053.be Penilaian Skrip Eselon I	21.200.000	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
41.	1845.950 - 053.bd Penyusunan Laporan Apip	9.000.000	100,00%	85,45%	75,00%	50,00%
42.	1845.950 - 053.oc Penyusunan Laporan Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	2.200.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43.	1845.950 - 053.be Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Terkait Isu-isu Aktual Industri	11.000.000	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%

44. 1845.950 - 054.c Penyusunan Laporan Keuangan Dan Brm	32.590.000	92,05%	93,88%	71,67%	49,60%
45. 1845.951 - 052.a Peningkatan Fasilitas Parkantoran	105.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46. 1845.994 - 001.a Pembayaran Gaji Dan Tunjangan	1.503.000.000	61,76%	38,17%	58,33%	50,90%
47. 1845.994 - 002.b - Persediaan Dan Perlengkapan Kantor	297.856.000	0,00%	45,23%	0,00%	0,00%
48. 1845.994 - 002.c - Biaya Langganan Dan Operasional Parkantoran	1.103.200.000	0,00%	81,86%	0,00%	0,00%
49. 1845.994 - 002.d - Koordinasi Dan Layanan Pimpinan	505.393.000	0,00%	7,70%	0,00%	0,00%
50. 1845.994 - 002.e - Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Operasional Kantor	822.742.000	0,00%	51,55%	0,00%	0,00%
51. 1845.994 - 002.a Honorarium Operasional	1.936.192.000	0,00%	25,78%	0,00%	0,00%
TOTAL	24.803.127.000	44,21%	39,59%	42,76%	36,72%

Realisasi Per Akun >> Daftar Kendala >> Summary Permasalahan >>

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	052.A Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja	125.365.000	68%	43,6%	85%	100%
2.	052.B Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan	7.450.000	53%	13,1%	66,7%	100%
3.	052.C Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN	14.140.000	70%	70,0%	100%	100%
4.	052.D Penilaian SAKIP Eselon II Itjen	0	0%	0%	0%	0%
5.	052.E Reviu Perkin dan Renstra	5.725.000	0%	0%	28,6%	0%
6.	052.F Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	0	0%	0%	0%	0%
7.	052.G Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri	0	0%	0%	0%	0%
8.	052.H Pra Evaluasi SAKIP ITJEN	0	0%	0%	0%	0%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

1845.950 - 052.E Reviu Perkin dan Renstra

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	Status Progres Selesai
1.	Melakukan reviu perkin dan renstra	Desember	28,6%	0%	Wajib Progres Selesai

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian

LAMPIRAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

TRIWULAN – II

TAHUN ANGGARAN 2020

INSPEKTORAT I



Home > Money Tapkin

Logout

Kegiatan Inspektorat I

Monitoring Capaian		Sasaran & Indikator											
No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. S1 - Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
S1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I *)IKU		2,8 %	40%	25%	67%	48%	53%	0%	100%	0%	48%	60%	100 %
Pagu = Rp. 1.490.957.000													
S1.2 - jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I *)IKU		5 %	18%	78%	44%	98%	91%	0%	100%	0%	98%	98%	85 %
Pagu = Rp. 8.516.000													
S1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti		80 %	21%	85%	57%	85%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100 %
Pagu = Rp. 3.740.000													
S1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan Internal yang ditindaklanjuti oleh Satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU		91 %	0%	0%	75%	0%	100%	0%	100%	0%	0%	33%	100 %
Pagu = Rp. 3.000.000													
Total Pagu Sasaran = Rp. 1.506.213.000													
2. S1 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
S1.5 - Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I *)IKU		3,6 %	20%	52%	63%	6%	100%	0%	100%	0%	6%	100%	0 %
Pagu = Rp. 6.760.000													
Total Pagu Sasaran = Rp. 6.760.000													
3. T1 - Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif													
T1.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan		75 %	29%	23%	59%	24%	86%	0%	100%	0%	24%	35%	0 %
Pagu = Rp. 177.540.000													
T1.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)		76 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
Pagu = Rp. 0													
Total Pagu Sasaran = Rp. 177.540.000													
4. L1 - Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien													
L1.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT		70 %	79%	77%	88%	77%	97%	0%	100%	0%	77%	70%	0 %
Pagu = Rp. 21.380.000													
L1.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya		80 %	50%	7%	100%	0%	100%	7%	100%	0%	0%	100%	0 %
Pagu = Rp. 3.380.000													
Total Pagu Sasaran = Rp. 24.760.000													
Total Pagu Keseluruhan = Rp. 1.715.273.000													

Dokumen ini dibuat oleh Kementerian Perindustrian

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
INSPEKTORAT I**

I. DATA UMUM

- 1 Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi
- 2 Nomor Kode dan Nama Fungsional
- 3 Nomor Kode dan Nama Buh Fungsional
- 4 Nomor Kode dan Nama Projeksi
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan
9. Tempat Kedudukan atau Pemanggung Jawab Kegiatan
- 10 Nomor Surat Izin Penerapan DIPA

II. DATA KHUSUS : INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)		Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total	5	
1	2	3	4	6	7	
001 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja			-	202.300	202.300	7 Unit/rajan
002 Pengembangan dan BMN Unit Kerja Cakupan			-	587.170	587.170	1 Unit
003 Pengembangan dan Kehilangan Indukain Cakupan Tugas			-	3.000	3.000	1 Unit
004 Pengembangan dan Tingkat Cakupan Tugas			-	65.838	65.838	1 Unit/rajan
005 Layanan Audit Internal			-	856.965	856.965	1 Layanan
Total			-	1.715.273	1.715.273	

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Kode	Output	S.D. Triwulan Lalu (%)						Triwulan Ini (%)						S.D. Triwulan Ini (%)		
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		S	R	
		S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	Fisik	R	S	R	
001	Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja Cakupan	36,27	21,35	34,33	27,92	37,94	17,32	28,60	0,99	74,22	38,67	62,93	28,30	DKI JAKARTA	11	12
002	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas	95,15	95,24	97,35	83,03	4,68	3,82	1,86	-	99,83	99,06	69,21	83,03	DKI JAKARTA	1	1
003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas	-	-	-	-	100,00	-	47,50	-	100,00	-	75,00	-	DKI JAKARTA	-	-
004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat	47,77	25,89	17,54	3,47	-	30,34	27,63	-	47,77	56,23	45,17	3,47	DKI JAKARTA	-	-
005	Layanan Audit Internal	20,42	17,31	18,37	27,33	14,47	15,57	27,34	0,20	34,89	32,88	45,70	27,53	DKI JAKARTA	-	-
Jumlah		48,89	44,76	47,22	46,60	13,48	12,30	18,86	0,22	62,37	67,05	66,08	46,78			

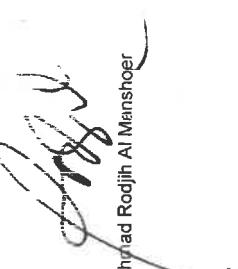
IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Dipertukarkan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaikan Masalah
1	2	3	4	5

Jakarta Selatan, 8 Januari 2017

Inspektur I Inspektorat

Ir. Achmad Rodjih Al Manshoer



KERTAS KERJA PENILAIAN

Sasaran : Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif
 Indikator : Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)
 Penjelasan : Penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL

No.	Jenis Penugasan	SIMAK-BMN	SAIBA	SAS	Buku Kas Bendahara	RKAKL	Penggunaan aplikasi
1.	Audit Sekjen	v	v	v	v	v	100%
2.	Audit Poltek STTT Bandung	v	v	v	v	v	100%
3.	Audit AKA Bogor	v	v	v	v	v	100%
4.	Audit SMAK Bogor	v	v	v	v	v	100%
5.	Audit BDI Jakarta	v	v	v	v	v	100%
6.	Audit BDI Makassar	v	v	v	v	v	100%
7.	Audit Poltek ATIM	v	v	v	v	v	100%
8.	Audit SMAK Makassar	v	v	v	v	v	100%
9.	SMTI Makassar	v	v	v	v	v	100%
T O T A L Penerapan TABK							100%

*) Check list pada aplikasi yang digunakan

LAMPIRAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
INSPEKTORAT II**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.03. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
5. Indikator Hasil
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 1842 - Peningkatan Penjawaban dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II
7. Jangka Waktu pelaksanaan Kegiatan : 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan : Dirs Wawas Swasthatafijah, M.Sc., QIA
9. Tempat Keleluhan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.06.1.1247985/2020

II. DATA KEJUJUAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Kode dan Nama Output	No. Loan	Anggaran (Rp. 000)			Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
		PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
001 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja		-	-	238,999	238,999	7 Laporan
002 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan		-	-	133,232	133,232	7 Laporan
003 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas		-	-	306,769	306,769	2 Laporan
004 Pengembangan dan Pengelolaan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas		-	-	271,089	271,089	1 Laporan
005 Pengembangan dan Pengelolaan Internal		-	-	260,812	260,812	1 Laporan
Total		-	-	1,210,901	1,210,901	

III. TARGET DAN RAIHAN PELAKSANAAN PER OUTPUT

Kode	Output	S.D. Triwulan Lalu (%)						Triwulan Ini (%)						S.D. Triwulan Ini (%)			Lokasi Kegiatan	
		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
		S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
101	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja	36.10	28.82	26.00	35.11	-	8.86	24.67	2.67	36.10	37.68	50.66	37.78	DKI JAKARTA	13	14		
112	Pengelolaan Keuangan dan BMN Unit Kejaya Cakupan	47.31	50.83	46.39	75.28	7.88	-	29.91	-	55.19	50.83	76.30	71.28	DKI JAKARTA				
113	Pembinaan Kepijakan Industri Cakupan Tugas	-	-	0.32	0.57	-	0.32	0.95	0.67	-	0.32	1.27	1.24	DKI JAKARTA				
114	Grafik Dilantik Pada Satuan Bantuan Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat	27.30	21.60	-	-	-	5.42	47.80	32.04	27.30	27.02	47.80	32.04	DKI JAKARTA				
965	Layanan Audit Internal	55.28	46.32	51.16	60.59	10.70	17.45	18.86	3.14	65.98	63.77	70.02	63.74	DKI JAKARTA				
Jumlah		30.35	26.09	21.33	28.41	3.17	6.80	23.17	8.55	33.52	32.90	44.60	36.95					

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
	TIDAK ADA KENDALA	-	-	-

Jakarta Selatan, 6 Juli 2020

Inspektur II Inspektorat Jenderal

Drs. Wawas S. Muliadi, MM



Kegiatan Inspektorat II

Monitoring Capaian

Sasaran & Indikator

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. II.C1 - Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian													
	II.C1.1 - Batas Toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	2,8 %	20%	27%	44%	37%	91%	0%	100%	0%	47%	32%	0 %
	Pagu = Rp. 960.037.000												
	II.C1.4 - Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 0												
	II.C1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %	25%	35%	50%	35%	75%	0%	100%	0%	35%	37%	100 %
	Pagu = Rp. 212.442.000												
	II.C1.2 - Rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	91 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 11.865.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 1.184.344.000												
2. II.C2 - Terwujudnya tata kelolah pemerintah yang baik													
	II.C2.1 - Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II	3,6 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
3. II.C3 - Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif													
	II.C3.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66,7 %
	Pagu = Rp. 0												
	II.C3.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
4. II.C4 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien													
	II.C4.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100 %
	Pagu = Rp. 0												
	II.C4.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70 %	34%	36%	56%	62%	78%	0%	100%	0%	60%	44%	— %
	Pagu = Rp. 26.557.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 26.557.000												
	Total Pagu Kesiaran = Rp. 1.716.961												

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN PERJUJAN KINERJA INSPEKTORAT II
TAHUN ANGGARAN 2020**
Unit Organisasi : Inspektorat II

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 TRIWULAN II

Jakarta, 6 Juli 2020
INSPEKTUR II

KERTAS KERJA PENILAIAN

Sasaran : Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif
Indikator : Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)
Penjelasan : Penugasan audit yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, RKAKL

No.	Jenis Penugasan	SIMAK-BMN	SAIBA	SAS	Buku Kas Bendahara	RKAKL	Penggunaan aplikasi
1.	Audit ke Direktorat Jenderal IKMA	V	V	V	V	V	100%
2.	Audit ke Direktorat Jenderal ILMATE	V	V	V	V	V	100%
3.	Audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)	-	-	-	-	-	Audit BMDTP dilaksanakan pada triwulan IV
TOTAL Penerapan TABK							66.67%

*) Check list pada aplikasi yang digunakan



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
INSPEKTORAT IV
(Aplikasi Form A)
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006)**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2020
INSPEKTORAT IV**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247885) INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konsinlksi
4. Nama Kode dan Nama Program : 04.07.03. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian
5. Indikator Hasil : 1844 - Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Jonni Afrizon, SE, MM
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 5
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : SP DIPA-019.06.1.247885/2020
10. Nama Bursa Pengesahan DPA

II. HARGA KUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	RBLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
(II)1 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja		-	115,815	115,815		
(II)2 Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan		-	134,601	134,601	7 Laporan	
(II)3 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan		-	11,782	11,782	7 Laporan	
(II)4 Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas		-	112,900	112,900	1 Laporan	
(II)5 Layanan Audit Internal		-	680,210	680,210	1 Laporan	
Total		-	1,055,308	1,055,308	1 Layanan	

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)												S.D. Triwulan Ini (%)											
	Keuangan				Fisik				Keuangan				Fisik				Keuangan				Fisik			
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R
001 Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja	25.39	17.00	20.68	20.68	26.57	32.89	24.14	24.14	51.95	49.89	44.82	44.82	-	-	-	-	12	12	13	13	-	-	-	-
002 Rilis Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan	-	-	63.56	63.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.56	63.56	63.56	63.56	-	-	-	-
003 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas	-	-	-	-	49.06	20.73	85.00	100.00	49.06	20.73	85.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004 Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas	22.14	22.74	25.00	25.00	15.77	4.45	21.66	21.66	37.91	27.19	46.66	46.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965 Layanan Audit Internal	0.35	0.37	9.16	4.79	7.75	11.57	32.33	38.65	8.10	11.93	41.48	43.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	5.38	4.53	18.95	16.14	10.15	11.77	26.75	30.99	15.53	16.31	45.70	47.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Lokaasi Kegiatan

IV. KEMBALIAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Memberikan Penyelesaian Masalah
1	103 Monitoring dan Evaluasi Kabijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Hasil pelaksanaan kurang optimal karena adanya dokumen yang berada di kantor (hardcopy) sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan/atau tidak dilakukan evaluasi.	- Sebaiknya besar pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan teleconference sehingga perlu penyusulan. Namun tidak ada masalah yang berarti.	-
2	114 Tinjauan Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat IV	- Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan meliputi peryelapan dokumen, manifikasi dan peninjauan lapangan terkendala dengan WFH	-	-
3.	865 Layanan Audit Internal			

Jakarta Selatan, 10 Juli 2020

Inspektorat IV

[Signature]
Jominton, SE, MM



Kegiatan Inspektorat IV

Monitoring Capaian		Sasaran & Indikator											
No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1. IJ.E1 - Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian													
	IJ.E1.1 - Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	2,8 %	28%	23%	53%	55%	84%	0%	96%	0%	56%	25%	0 %
	Pagu = Rp. 615.941.000												
	IJ.E1.2 - Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 0												
	IJ.E1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %	0%	0%	30%	30%	70%	0%	100%	0%	30%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 251.679.000												
	IJ.E1.4 - Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	91 %	0%	0%	41%	45%	76%	0%	100%	0%	45%	4%	0 %
	Pagu = Rp. 56.773.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 924.393.000												
2. IJ.E2 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik													
	IJ.E2.1 - Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	3,6	25%	25%	25%	25%	25%	0%	25%	0%	25%	54%	0
	Pagu = Rp. 15.100.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 15.100.000												
3. IJ - ?													
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
4. IJ.E3 - Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif													
	IJ.E3.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	20%	20%	44%	44%	68%	0%	100%	0%	48%	52%	0 %
	Pagu = Rp. 107.715.000												
	IJ.E3.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 107.715.000												
5. IJ.E4 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien													
	IJ.E4.1 - Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70 %	25%	25%	50%	50%	75%	0%	100%	0%	50%	37%	46 %
	Pagu = Rp. 8.100.000												
	IJ.E4.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan berannva	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	39%	100 %
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 8.100.000												
	Total Pagu Kesekuruan = Rp. 1.065.715.000												

Lampiran Monev Kinerja Anggaran (Monev DJA)

Data diambil dari aplikasi DJA yang diakses melalui website <http://monev.anggaran.kemendag.go.id/2020> dengan cara entri data Realisasi Volume Keluaran dan Indikator Keluaran Kegiatan di setiap bulan. Seluruh data dimasukan sesuai dengan progres realisasi fisik kegiatan di setiap bulannya dengan presentasi masing-masing kegiatan disesuaikan dengan output capaian yang hendak dicapai selama satu tahun anggaran.

Persentase Realisasi Volume Keluaran (RVK) diperoleh dengan membandingkan progres tahapan yang dilaksanakan pada bulan tersebut dibandingkan dengan target capaian akhir. Sebagai contoh ilustrasi:

$$\%RVK \text{ Layanan Manajemen Pengawasan} = \frac{\text{Volume Keluaran pada Periode Pelaporan}}{\text{Total Keluaran dalam Setahun}} \times \frac{\text{Bulan Pelaporan}}{\text{Total Bulan Layanan Setahun}}$$

$$\%RVK \text{ Layanan Reviu} = \frac{\text{Volume Keluaran pada Periode Pelaporan}}{\text{Total Keluaran dalam Setahun}} \times \frac{\text{Bulan Pelaporan}}{\text{Total Bulan Layanan Setahun}}$$

$$\%RVK \text{ Layanan Consulting Pengawasan} = \frac{\text{Volume Keluaran pada Periode Pelaporan}}{\text{Total Keluaran dalam Setahun}} \times \frac{\text{Bulan Pelaporan}}{\text{Total Bulan Layanan Setahun}}$$

$$\%RVK \text{ Layanan Audit Internal} = \frac{\text{Satker yang sedang diaudit}}{\text{Total Satker Cakupan Tugas Inspektorat IV}} \times \frac{\text{Tahapan Audit yang sedang dilaksanakan}}{\text{Output yang telah dilaksanakan}} \times \frac{5}{\text{Total Komponen pada Layanan Audit}}$$

[Home > ALKI](#)
[Logout](#)

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Inspektorat I TA 2019

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1841.001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (pkpt)	21.380.000	71,94%	70,00%	91,00%	76,60%
2.	1841.001 - Penyusunan Anggaran Tahun 2021	3.380.000	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
3.	1841.001 - Pembahasan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Lainnya	3.380.000	0,00%	100,00%	100,00%	59,00%
4.	1841.001 - Koordinasi Dan Penyusunan Lakip	3.380.000	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
5.	1841.001 - Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya	170.780.000	87,83%	32,28%	67,19%	23,48%
6.	1841.002 - Koordinasi Dan Pelaksanaan Reviu	36.380.000	100,00%	100,00%	100,00%	64,00%
7.	1841.002 - Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (lk-bmkn)	527.470.000	100,00%	99,28%	100,00%	84,20%
8.	1841.002 - Pelaksanaan Reviu Pengendalian Atas Pelaporan Keuangan (pkp)	22.320.000	100,00%	96,77%	100,00%	90,00%
9.	1841.002 - Koordinasi Dan Pelaksanaan Reviu Rkbmn	1.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	1841.003 - Koordinasi Dan Pelaksanaan Penilaian Implementasi Sakip	3.000.000	100,00%	33,33%	100,00%	0,00%
11.	1841.004 - Koordinasi Pendampingan/pengawalan Kegiatan Berisiko Tinggi Dan Pembinaan Kinerja Pengawasan Kinerja	3.000.000	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%
12.	1841.004 - Pelaksanaan Pendampingan/pengawalan Kegiatan Berisiko Tinggi (pekerjaan Konstruksi Gedung Pendidikan, Mesin/peralatan Pendidikan Dan Pembinaan Tenaga Kerja/tenaga Pendidik)	17.190.000	100,00%	96,60%	54,55%	4,00%
13.	1841.004 - Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Kinerja Oleh Plmpinan	38.888.000	25,71%	36,42%	54,55%	3,00%
14.	1841.004 - Koordinasi Dan Pelaksanaan Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko	6.760.000	100,00%	99,93%	77,14%	6,40%
15.	1841.965 - Koordinasi Audit Program Pengembangan Sdm Industri	21.730.000	18,41%	81,59%	82,00%	4,20%
16.	1841.965 - Pelaksanaan Audit Kinerja Program Pengembangan Sdm Industri	815.479.000	47,21%	32,53%	54,55%	27,40%
17.	1841.965 - Koordinasi Dan Pelaksanaan Pendampingan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit	8.516.000	0,00%	97,71%	60,00%	98,40%
18.	1841.965 - Koordinasi Dan Pelaksanaan Reviu Rkd	7.500.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19.	1841.965 - Koordinasi Dan Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Terbertu	3.740.000	0,00%	100,00%	71,25%	100,00%
TOTAL		1.715.273.000	69,04%	58,04%	72,30%	45,75%

[Realisasi Per Akun >>](#)
[Daftar Kendala >>](#)
[Summary Permasalahan >>](#)

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	052.A Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja	125.365.000	68%	48,6%	85%	100%
2.	052.B Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan	7.450.000	53%	13,1%	66,7%	100%
3.	052.C Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN	14.140.000	70%	70,0%	100%	100%
4.	052.D Penilaian SAKIP Eselon II Itjen	0	0%	0%	0%	0%
5.	052.E Reviu Perkin dan Renstra	5.725.000	0%	0%	28,6%	0%
6.	052.F Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	0	0%	0%	0%	0%
7.	052.G Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri	0	0%	0%	0%	0%
8.	052.H Pra Evaluasi SAKIP ITJEN	0	0%	0%	0%	0%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

1845.950 - 052.E Reviu Perkin dan Renstra

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Melakukan reviu perkin dan renstra	Desember	28,6%	0%	Lapor Progres Selesai



Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Inspektorat II TA 2019

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1842.001 - Penyusunan Program Kerja Dan Anggaran	10.692.000	60,97%	45,32%	58,33%	60,00%
2.	1842.001 - Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas	15.865.000	58,70%	42,50%	80,00%	60,00%
3.	1842.001 - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	212.442.000	46,37%	36,80%	58,33%	35,00%
4.	1842.002 - Reviu Laporan Keuangan Dan Bmn Satuan Kerja Inspektorat Ii	65.866.000	93,66%	48,67%	83,33%	62,50%
5.	1842.002 - Reviu Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (pipk)	67.366.000	100,00%	52,95%	100,00%	100,00%
6.	1842.003 - Monitoring Dan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Inspektorat Ii	5.846.000	50,00%	16,88%	83,33%	100,00%
7.	1842.003 - Persiapan Pelaksanaan Monev Program Penumbuhan Wirausaha Baru (wub) Ditjen Ikma	28.824.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.	1842.003 - Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring Ke Dinas Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi	272.099.000	32,34%	0,00%	0,00%	0,00%
9.	1842.004 - Pengawalan Triwulan Kegiatan Prioritas Ditjen Ilmate Dan Ditjen Ikma	12.219.000	33,33%	0,00%	60,00%	0,00%
10.	1842.004 - Pelaksanaan Evaluasi Dan Monitoring Penyelesaian Hibah Bmn Di Ditjen Ilmate Dan Ikma	248.178.000	53,19%	29,50%	66,67%	67,00%
11.	1842.004 - Koordinasi Pemetaan Bmn Yang Belum Dihibahkan Di Ditjen Ilmate Dan Ikma	10.692.000	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%
12.	1842.965 - Audit Kinerja Pada Program Penumbuhan Dan Pengembangan Ditjen Ilmate	82.002.000	100,00%	88,89%	100,00%	88,00%
13.	1842.965 - Audit Pengembangan Dan Penumbuhan Industri Kedl, Menegah Dan Aneka Dan Bpji Sidoarjo	100.629.000	100,00%	92,86%	100,00%	100,00%
14.	1842.965 - Audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (bmtp) Ditjen Ilmate Dan Ditjen Ikma	56.970.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
15.	1842.965 - Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Di Ditjen Ilmate Dan Ikma	11.865.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
16.	1842.965 - Reviu Perencanaan Anggaran (raka)	9.346.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL		1.210.901.000	54,22%	32,89%	51,65%	44,36%

[Realisasi Per Akun >>](#) [Daftar Kendala >>](#) [Summary Permasalahan >>](#)

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	D52.A Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja	125.365.000	58%	48,5%	85%	100%
2.	052.B Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan	7.450.000	53%	13,1%	66,7%	100%
3.	D52.C Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN	14.140.000	70%	70,0%	100%	100%
4.	052.D Penilaian SAKIP Eselon II Ijten	0	0%	0%	0%	0%
5.	052.E Reviu Perkin dan Renstra	5.725.000	0%	0%	28,6%	0%
6.	052.F Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	0	0%	0%	0%	0%
7.	052.G Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri	0	0%	0%	0%	0%
8.	052.H Pra Evaluasi SAKIP ITJEN	0	0%	0%	0%	0%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

1845.950 - 052.E Reviu Perkin dan Renstra

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik
1.	Melakukan reviu perkin dan renstra	Desember	28,6%	0% Lapor Progres Selesai

Logout

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Inspektorat III TA 2019

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1843.001 - 1843.001.051.a.521211 Koordinasi Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (pkpt) Inspektorat Iii	14.380.000	0,00%	41,72%	0,00%	0,00%
2.	1843.001 - 1843.001.051.b Penyusunan Anggaran Inspektorat Iii Tahun 2021	1.599.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
3.	1843.001 - 1843.001.052.a Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Iii	4.070.000	24,57%	0,00%	62,50%	75,00%
4.	1843.001 - 1843.001.053.a Koordinasi Peran Pengawasan Lainnya Cakupan Tugas Inspektorat Iii	176.880.000	42,40%	74,20%	58,33%	60,00%
5.	1843.002 - 1843.002.052.a Pelaksanaan Reviu Rk-bnn	33.120.000	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%
6.	1843.002 - 1843.002.051.c Reviu Pjpk Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat Iii	20.353.000	50,87%	4,91%	87,50%	0,00%
7.	1843.002 - 1843.002.051.b Reviu Laporan Keuangan Dan Bnn	495.874.000	74,62%	77,86%	75,00%	50,00%
8.	1843.002 - 1843.002.051.a Koordinasi Reviu Laporan Keuangan Dan Bnn	46.900.000	10,66%	56,03%	75,00%	50,00%
9.	1843.003 - 1843.003.051.a Koordinasi Monev Sakip	12.732.000	0,00%	1,18%	100,00%	100,00%
10.	1843.004 - 1843.004.052.b Pelaksanaan Pengawalan Kinerja	216.200.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11.	1843.965 - 1843.965.052.a Audit Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	15.450.000	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
12.	1843.965 - 1843.965.052.b Audit Program Silnas (satker Pusdatin)	450.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	1843.965 - 1843.965.052.c Audit Program Pengembangan Teknologi Dan Kebijakan Industri	264.580.000	0,00%	0,00%	3,00%	100,00%
14.	1843.965 - 1843.965.055.a Koordinasi Penyusunan Reviu Rka-ki	2.180.000	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%
15.	1843.965 - 1843.965.055.b Reviu Rka-ki	22.045.000	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%
TOTAL		1.326.813.000	35,94%	41,51%	43,73%	50,75%

[Realisasi Per Akun >>](#) [Daftar Kendala >>](#) [Summary Permasalahan >>](#)

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	052.A Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja	125.365.000	68%	48,5%	85%	100%
2.	052.B Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan	7.450.000	53%	13,1%	66,7%	100%
3.	052.C Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN	14.140.000	70%	70,0%	100%	100%
4.	052.D Penilaian SAKIP Eselon II Ijjen	0	0%	0%	0%	0%
5.	052.E Reviu Perkin dan Renstra	5.725.000	0%	0%	28,6%	0%
6.	052.F Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	0	0%	0%	0%	0%
7.	052.G Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri	0	0%	0%	0%	0%
8.	052.H Pra Evaluasi SAKIP ITJEN	0	0%	0%	0%	0%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

1845.950 - 052.E Reviu Perkin dan Renstra

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	Lapor Progres Selesai
1.	Melakukan reviu perkin dan renstra	Desember	28,6%	0%	

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Inspektorat IV TA 2019

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1844.001 - Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dan Anggaran	8.190.000	53,70%	37,04%	58,33%	50,00%
2.	1844.001 - Penyusunan Dokumen Evaluasi Dan Akuntabilitas	20.015.000	45,40%	41,43%	40,00%	40,00%
3.	1844.001 - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	87.700.000	66,02%	53,06%	58,33%	50,00%
4.	1844.002 - Reviu Laporan Keuangan Dan Brmn Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat Iv	127.689.000	0,00%	11,51%	83,50%	67,00%
5.	1844.002 - Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Cakupan Tugas Inspektorat Iv	6.912.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6.	1844.003 - Monitoring Dan Evaluasi Sakip Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat Iv	11.782.000	72,41%	20,73%	100,00%	100,00%
7.	1844.004 - Konsultasi Penyusunan Peta Risiko Satuan Kerja	15.100.000	66,56%	53,75%	25,00%	25,00%
8.	1844.004 - Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	97.800.000	38,65%	25,85%	58,33%	50,00%
9.	1844.965 - Reviu Perencanaan Anggaran	43.508.000	26,71%	5,71%	37,50%	10,00%
10.	1844.965 - Tidak Lanjut Hasil Pengawasan Bpk	44.991.000	0,00%	0,00%	43,33%	30,00%
11.	1844.965 - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	251.679.000	52,99%	0,00%	43,33%	30,00%
12.	1844.965 - Pengawasan Program P3dn	17.060.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	1844.965 - Pengawasan Program Ketahanan Pengembangan Perwillyangan Industri & Akses Industri Internasional	76.862.000	5,81%	0,00%	43,33%	26,50%
14.	1844.965 - Pengawasan Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	148.160.000	0,00%	75,55%	100,00%	95,00%
15.	1844.965 - Pengawasan Program Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Kimia, Farmasi, Dan Tekstil	97.950.000	78,61%	0,00%	61,33%	45,00%
TOTAL		1.055.308.000	33,56%	21,18%	59,65%	47,80%

[Realisasi Per Akun >>](#) [Daftar Kendala >>](#) [Summary Permasalahan >>](#)

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	052.A Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja	125.365.000	68%	48,6%	85%	100%
2.	052.B Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan	7.450.000	53%	13,1%	66,7%	100%
3.	052.C Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN	14.140.000	70%	70,0%	100%	100%
4.	052.D Penilaian SAKIP Eselon II Itjen	0	0%	0%	0%	0%
5.	052.E Reviu Perkin dan Renstra	5.725.000	0%	0%	28,6%	0%
6.	052.F Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	0	0%	0%	0%	0%
7.	052.G Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri	0	0%	0%	0%	0%
8.	052.H Pra Evaluasi SAKIP ITJEN	0	0%	0%	0%	0%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

1845.950 - 052.E Reviu Perkin dan Renstra

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	Lapor Progres Selesai
1.	Melakukan reviu perkin dan renstra	Desember	28,6%	0%	Lapor Progres Selesai



Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBN Setitjen TA 2019

Pagu anggaran pada ALKI = Rp. 0

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	1845.950 - 053.af Rapat Koordinasi Pengawasan	151.110.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.	1845.950 - 057.f Penilaian Dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor	101.600.000	99,83%	99,83%	100,00%	100,00%
3.	1845.950 - 052.e Koordinasi Pembinaan Kepegawaian	64.400.000	96,84%	98,23%	58,33%	88,90%
4.	1845.950 - 057.d Pelatihan Di Kantor Sendiri	9.200.000	100,00%	60,87%	63,64%	61,00%
5.	1845.950 - 057.b Keikutsertaan Diklat Pengembangan Sdm Itjen	45.180.000	82,12%	82,12%	95,83%	95,00%
6.	1845.950 - 057.a Koordinasi Pengembangan Sdm	49.950.000	43,45%	28,84%	58,33%	50,00%
7.	1845.950 - 056.i Pembinaan Dan Pengawasan Aspek Kepegawaian Dan Hukum Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	207.200.000	0,00%	20,08%	0,00%	0,00%
8.	1845.950 - 056.g Pelaksanaan Penelaahan Sejawat	33.225.000	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
9.	1845.950 - 056.d Koordinasi Pelaksanaan Klinik Konsultasi Pengawasan	22.140.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10.	1845.950 - 056.c Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan, Bantuan Dan Konsultasi Hukum Di Bidang Pengawasan	231.980.000	0,00%	96,07%	0,00%	0,00%
11.	1845.950 - 057.j Fasilitasi Bebas Masa Tugas Mengjelang Pensiun Pns Inspektorat Jenderal	24.250.000	56,25%	43,75%	54,55%	43,00%
12.	1845.950 - 058.d Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Ketatausahaan Dan Kearsipan Inspektorat Jenderal	89.160.000	0,00%	27,98%	0,00%	0,00%
13.	1845.950 - 058.f Percepatan Penanganan Dan Antisipasi Covid 19 Di Lingkungan Inspektorat Jenderal	96.000.000	0,00%	85,29%	0,00%	0,00%
14.	1845.950 - 061.e Penilaian Mandiri Satuan Kerja Zona Integritas Dalam Rangka Mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	49.800.000	0,00%	3,46%	100,00%	20,00%
15.	1845.950 - 061.d Forum Koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian(pmprb)	71.200.000	0,00%	14,79%	90,00%	70,00%
16.	1845.950 - 061.b Evaluasi Penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	2.070.000	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
17.	1845.950 - 060.e Perjalanan Dinas Pimpinan	211.200.000	0,00%	13,44%	0,00%	0,00%
18.	1845.950 - 060.c Penerbitan Majalah Solusi	153.220.000	0,00%	54,58%	0,00%	0,00%
19.	1845.950 - 060.b Pemutakhiran Data Dan Informasi	12.536.000	0,00%	79,37%	0,00%	0,00%
20.	1845.950 - 058.f Pelayanan Umum Dan Rapat Kedinasan	46.396.000	0,00%	79,53%	0,00%	0,00%
21.	1845.950 - 058.e Penataan Dan Penghapusan Arsip/dokumen Pengawasan Dari Arsip Inakdif	17.000.000	0,00%	5,59%	0,00%	0,00%
22.	1845.950 - 056.a Penyusunan Rancangan Peraturan Program Prioritas Tahunan Di Lingkungan Inspektorat Jenderal	74.702.000	0,00%	18,83%	0,00%	0,00%
23.	1845.950 - 054.f Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Keuangan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	11.850.000	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%
24.	1845.950 - 053.aa Koordinasi Dalam Rangka Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	144.590.000	0,00%	11,11%	33,00%	23,00%
25.	1845.950 - 052.e Reviu Perkin Dan Renstra	5.725.000	0,00%	0,00%	28,57%	0,00%
26.	1845.950 - 052.c Penyusunan Dan Reviu Lakip Itjen Dan Set Itjen	14.140.000	70,01%	70,01%	100,00%	100,00%
27.	1845.950 - 052.b Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan	7.450.000	53,37%	13,10%	66,67%	100,00%
28.	1845.950 - 052.a Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Rencana Kerja	125.365.000	68,09%	48,60%	85,00%	100,00%
29.	1845.950 - 051.g Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Program Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	272.000.000	0,00%	34,41%	0,00%	0,00%
30.	1845.950 - 051.e Penyusunan Plkt Inspektorat Jenderal	15.900.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
31.	1845.950 - 051. C Penyusunan Rakkip Inspektorat Jenderal	12.900.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
32.	1845.950 - 051. A Koordinasi Program Pengawasan	283.120.000	0,00%	58,75%	0,00%	0,00%
33.	1845.950 - 053.ad Temu Teknis Penyuluhan / Pemutakhiran Data Tindak Lanjut	23.100.000	0,00%	14,12%	0,00%	0,00%
34.	1845.950 - 053.ae Tindak Lanjut Hasil Monitoring Evaluasi Dan Reviu Inspektorat Jenderal	10.900.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
35.	1845.950 - 053.ba Koordinasi Analisis Dan Evaluasi Pelaporan Hasil Pengawasan	750.000	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
36.	1845.950 - 054.e Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan	9.140.000	71,12%	72,44%	50,00%	50,00%
37.	1845.950 - 054.b Koordinasi Dan Sinkronisasi Administrasi Keuangan Dan Bmn	49.100.000	75,36%	52,91%	58,33%	45,00%
38.	1845.950 - 054.a Pelayanan Perbendaharaan	68.615.000	51,88%	51,02%	58,33%	50,00%
39.	1845.950 - 053.ca Bimbingan Dan Pengawasan Aspek Tindak Lanjut/evaluasi Hasil Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian	38.000.000	0,00%	99,41%	100,00%	100,00%
40.	1845.950 - 053.be Penilaian Sakip Eselon I	21.000.000	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
41.	1845.950 - 053.bd Penyusunan Laporan Apip	9.990.000	100,00%	89,49%	75,00%	50,00%
42.	1845.950 - 053.bc Penyusunan Laporan Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Tematik	2.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
43.	1845.950 - 053.bb Analisis Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Terkait Isu-isu Aktual Bidang Industri	11.000.000	0,00%	0,00%	40,00%	40,00%

44. 1845.950 - 054.c Penyelesaian Laporan Keuangan Dari Bmn	32.590.000	92,05%	93,88%	71,67%	49,80%
45. 1845.951 - 052.a Peningkatan Fasilitas Perkantoran	105.000.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
46. 1845.994 - 001.a Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Kantor	17.000.000.000	61,76%	38,17%	58,33%	50,00%
47. 1845.994 - 002.b - Persediaan Dan Perlengkapan Kantor	297.856.000	0,00%	45,23%	0,00%	0,00%
48. 1845.994 - 002.c - Biaya Langganan Dan Operasional Perkantoran	1.103.200.000	0,00%	81,86%	0,00%	0,00%
49. 1845.994 - 002.d - Koordinasi Dan Layanan Pimpinan	605.393.000	0,00%	7,70%	0,00%	0,00%
50. 1845.994 - 002.e - Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Operasional Kantor	822.742.000	0,00%	51,55%	0,00%	0,00%
51. 1845.994 - 002.a Honorarium Operasional	1.936.192.000	0,00%	25,78%	0,00%	0,00%
TOTAL	24.803.127.000	44,21%	39,59%	42,76%	36,72%

[Realisasi Per Akun >>](#) [Daftar Kendala >>](#) [Summary Permasalahan >>](#)

No.	Kegiatan	Pagu	Target Keuangan	Realisasi Keuangan	Target Fisik	Realisasi Fisik
1.	052.A Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kerja Rencana Kerja	125.365.000	68%	48,6%	85%	100%
2.	052.B Penyusunan Rencana Aksi Hasil Evaluasi Triwulan	7.450.000	53%	13,1%	66,7%	100%
3.	052.C Penyusunan dan Reviu LAKIP ITJEN dan SET ITJEN	14.140.000	70%	70,0%	100%	100%
4.	052.D Penilaian SAKIP Eselon II Itjen	0	0%	0%	0%	0%
5.	052.E Reviu Perkin dan Renstra	5.725.000	0%	0%	28,6%	0%
6.	052.F Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat Jenderal	0	0%	0%	0%	0%
7.	052.G Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan di Luar Negeri	0	0%	0%	0%	0%
8.	052.H Pra Evaluasi SAKIP ITJEN	0	0%	0%	0%	0%

Tahapan Kegiatan yang Harus Segera Diselesaikan

1845.950 - 052.E Reviu Perkin dan Renstra

No.	Tahapan	Batas Waktu	Target Fisik s.d. Akhir Bulan Ini	Realisasi Fisik	
1.	Melakukan reviu perkin dan renstra	Desember	28,6%	0%	Lapor Progres Selesai

Dikelola oleh Kementerian Perindustrian

PERKIN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal
Selanjutnya disebut pihak pertama.

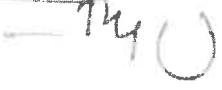
Nama : Agus Gumiwang Kartasasmita
Jabatan: Menteri Perindustrian
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Maret 2020
MENTERI PERINDUSTRIAN **INSPEKTUR JENDERAL**

 AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

 ARUS GUNAWAN

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *) IKU	1,5%
		Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti	5%
		Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Persentase Nilai RB area penguatan pengawasan	70%
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *) IKU	Level 3
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian	Level 3 IACM

No	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat I	Rp3.400.000.000
2	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	Rp3.438.717.000
3	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat III	Rp3.373.590.000
4	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV	Rp3.421.785.000
5	Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal	Rp36.089.938.000
Total Anggaran Tahun 2020 : Rp49.724.030.000 (Empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah)		

MENTERI PERINDUSTRIAN

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Jakarta, 18 Maret 2020
 INSPEKTUR JENDERAL

ARUS GUNAWAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Liliek Widodo
Jabatan: Sekretaris Inspektorat Jenderal
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur Jenderal

Sekretaris Inspektorat Jenderal



Arus Gunawan



Liliek Widodo

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1 Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80%
		S2 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S3 Peningkatan nilai RB arca penguatan pengawasan *) IKU	70%
		S4 Nilai Maturitas SPIP Kemenperin *) IKU	3,6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1 Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2 Level Kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian *) IKU	IACM level 3
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	L1 Sistem informasi Pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	10%
		L2 Penyesuaian pedoman/prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundungan yang berlaku	50%
		L3 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan tahunan dengan PKPT	70%
		L4 Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	80%
		L5 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%
		L6 Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Ijen	90%
5	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	L7 Sharing knowledge atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	50%
		L8 Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	50%
		L9 Tingkat kepatuhan terhadap kode etik auditor	90%
		L10 Layanan Perkantoran	12 bulan layanan

KEGIATAN

Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

ANGGARAN

Rp36.089.938.000

Total Anggaran Tahun 2020

Rp36.089.938.000

(Tiga puluh enam miliar delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Inspektur Jenderal,

Arus Gunawan

Jakarta, 10 Maret 2020
 Sekretaris Inspektorat Jenderal



Liliket Widodo

**PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Koordinasi Penilaian Maturitas SPIP unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	1 Kegiatan
2	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Koordinasi pelaksanaan pengawasan berdasarkan standar pelaksanaan pengawasan	1 Kegiatan
3	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Koordinasi perencanaan program pengawasan berdasarkan analisa risiko	3 dokumen
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan	10 dokumen

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lilik Widodo

Jakarta, Januari 2020
Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan

YL Didid Kristiawan

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN EVALUASI, DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	1 laporan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dengan PKPT Melakukan pemantauan kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	4 laporan 10 dokumen

Kepala Bagian Program, Evaluasi

dan Pelaporan

YL. Didi Kristiawan

Jakarta, Januari 2020
Kepala Sub Bagian Evaluasi, dan Pelaporan


Rika Betty Nurindah R

PERJANJIAN KINERJA
PELAKSANA PADA SUB BAGIAN EVALUASI, DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Mengumpulkan dan mengolah data kuesioner monitoring dan evaluasi dalam rangka menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	1 laporan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Mengumpulkan dan mengolah data kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	12 laporan
		Menyiapkan konsep laporan pemanfaatan dan evaluasi pertemuan pengawasan dengan PKPT	4 laporan
		Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal (PP39)	4 dokumen
		Menyiapkan konsep laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan sekretariat Inspektorat Jenderal (PP39)	4 dokumen
		Menyiapkan konsep laporan kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal (Lakip Ses Itjen)	1 laporan
		Mengerjakan tugas sesuai instruksi pimpinan	12 laporan

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan

Rika Betty Nurindah R

Jakarta, Januari 2020

Pelaksana

Ratih Putri Antini

PERJANJIAN KINERJA
PELAKSANA PADA SUB BAGIAN EVALUASI, DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Menyiapkan kuesioner monitoring dan evaluasi dalam rangka menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	1 laporan
		Menyiapkan konsep laporan monitoring dan evaluasi dalam rangka menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	1 laporan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Mengumpulkan dan mengolah data evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal (PP39)	4 dokumen
		Menyiapkan konsep laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal (PP39)	4 dokumen
		Menyiapkan konsep laporan kinerja Inspektorat Jenderal (LAKIP Itjen)	1 laporan
		Menyiapkan konsep laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Itjen bulanan	12 laporan
		Mengerjakan tugas sesuai instruksi pimpinan	12 laporan

Jakarta, Januari 2020

Pelaksana

**Kepala Sub Bagian Evaluasi dan
Pelaporan**

Rika Betty Nurindah R

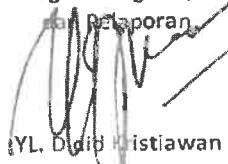
Aruma Keicha Chandritia

**PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	1 kegiatan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021 Menyusun RKAKL 2021 Menyusun Kebijakan Pengawasan Tahun 2021	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Jakarta, Januari 2020

Kepala Bagian Program, Evaluasi ,
dan Pelaporan



(YL. Dedi Istiawan)

Kepala Sub Bagian Program



Octaviyanto Jimat Wibowo

**PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	1 kegiatan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Menyusun RKAKL 2021	1 dokumen

Jakarta, Januari 2020

Kepala Subbagian Bagian Program,
dan Anggaran

Oktaviyanto Jimat Wibowo

Pefaksana

Ferdi Surya Pradana



PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program	1	Mengkoordinir tindak lanjut pengaduan masyarakat	3 Laporan
2	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	1	Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapabilitas APIP	1 Laporan
3	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Memonitor dan mengevaluasi prosedur kerja	1 Laporan
		2	Melaksanakan internalisasi dan penyesuaian standar kerja	1 Laporan
		3	Melaksanakan penilaian RB Itjen	90%
		4	Melaksanakan penyusunan pengembangan kompetensi auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal	1 Dokumen
4	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	1	Mengkoordinir pelaksanaan PKS sesuai kebutuhan	90%
		2	Mengkoordinir pelaksanaan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	90%
		3	Melaksanakan pemantauan terhadap kode etik auditor	1 Kegiatan

Jakarta, 30 Januari 2020

Sekretaris Inspektorat
Jenderal

Liliek Widodo
NIP. 196406181991031003

Kepala Bagian
Kepegawaian, Hukum, dan
Organisasi

Ismiyati
NIP. 196409291990032007

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Menyusun Profil, Peta Kompetensi, Potensi Auditor dan Analisis Kebutuhan Diklat Inspektorat Jenderal	1 Dokumen
2	Tertujuhnya APIP yang profesional dan berintegritas	Melaksanakan PKS sesuai kebutuhan	90%
		Memverifikasi persyaratan Diklat Kompetensi/Profesi sesuai Rencana Kebutuhan Diklat	90%
		Melaksanakan Kegiatan Pemantauan terhadap kode Etik Auditor	1 Kegiatan

Jakarta, Januari 2020

Kepala Bagian
Kepegawaian, Hukum dan Organisasi



Ismiyati

Kepala Sub Bagian Kepegawaian



Fitriah A Somad

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Menyusun Draft Peta Kompetensi serta Potensi Auditor Inspektorat Jenderal	1 Dokumen
2	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Melaksanakan Diklat Kompetensi/Profesi Tahun 2020 Menyiapkan draft laporan Pemantauan Kode Etik Auditor	90% 1 Laporan

Jakarta, Januari 2020

Kepala Sub Bagian Kepegawaian



Fitriah A Somad

Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian



Indra Irwan

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Menyusuri Draft Analisis Kebutuhan Diklat Auditor Inspektorat Jenderal	1 Dokumen
2	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Menyiapkan administrasi pelaksanaan PKS	100%

Jakarta, Januari 2020

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian


Fitriah A Somad


Ashari Dwicahyo Noviyandri

**PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

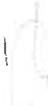
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Menyusun Draft Profil Auditor Inspektorat Jenderal	1 Dokumen
2	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Menyiapkan administrasi Diklat Kompetensi/Profesi	100%

Jakarta, Januari 2020

Kepala Sub Bagian Kepegawaian


Fitriah A Somad

Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian


Adam Ardiansyah

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

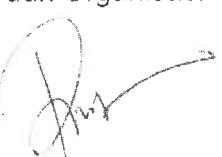
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	1	Melaksanakan fasilitasi pelayanan, bantuan, dan konsultasi hukum di bidang pengawasan	1 Laporan
		2	Mengkoordinir pemenuhan aksi pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Perindustrian	1 Laporan
		3	Melaksanakan fasilitasi bimbingan pengawasan aspek kepegawaian dan	1 Laporan
2	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	1	Melaksanakan fasilitasi evaluasi mandiri dalam rangka peningkatan kapabilitas	1 Kegiatan
		2	Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan telaah sejawat	1 Kegiatan
3	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Melaksanakan fasilitasi evaluasi proses bisnis dan SOP-AP Inspektorat Jenderal	1 Kegiatan
		2	Menyusun Progsun 2021 dan fasilitasi penyusunan peraturan bidang	1 Dokumen
		3	Melaksanakan fasilitasi penilaian mandiri reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal	1 Kegiatan

Jakarta, 30 Januari 2020

Kepala Bagian Kepegawaian,
Hukum dan Organisasi


Ismiyati
NIP 196409291990032007

Kepala Subbagian Hukum
dan Organisasi


Ratno Adi Hartanto
NIP 198203032010011024

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program	1	Menyiapkan bahan fasilitasi aksi pencegahan korupsi.	1 Laporan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Menyiapkan bahan rancangan peraturan program prioritas tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal	1 Dokumen
		2	Menyiapkan bahan evaluasi peraturan bidang pengawasan	1 Dokumen
		3	Menyiapkan bahan evaluasi reformasi birokrasi	1 Kegiatan

Jakarta, 30 Januari 2020

Kepala Subbagian Hukum
dan Organisasi

Ratno Adi Hartanto
NIP. 198203032010011024

Pelaksana Subbagian
Hukum dan Organisasi

Ira Sukmayanti
NIP. 199004212014022001

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
BAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	1 Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan kapabilitas AP/PIP	100%
		2 Penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan telaah sejawat	100%
2	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1 Kompilasi dan pendokumentasian SOP-AP	100%
		2 Penyusunan bahan evaluasi proses bisnis	100%

Jakarta, Januari 2020

Kepala Subbagian Hukum dan Organisasi

Ratno Adi Hartanto

Pelaksana Subbagian Hukum dan Organisasi

Gun Gun Gumilar Nurul Zatnika

**PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	90%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70%
3	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	80%

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Liliek Widodo

Jakarta, Januari 2020

Kepala Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan Evaluasi Hasil Pengawasan

Herry Rusli Kuncoro



PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker	90%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Peningkatan nilai RB area penguatan pengawasan	70%
3	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Tingkat perolehan Data dan informasi pengawasan yang memadai	80%

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Liliek Widodo

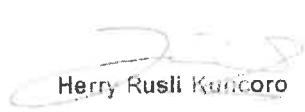
Jakarta, Januari 2020
 Kepala Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut dan
 Evaluasi Hasil Pengawasan

Henry Rusli Kuncoro

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Melaksanakan pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan	90%
		Tersusunnya Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	2 Laporan
2	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Melaksanakan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan triwulan	4 Laporan
		Melaksanakan Penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Reviu Inspektorat Jenderal	1 Laporan

Kepala Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut
dan
Evaluasi Hasil Pengawasan



Herry Rusli Kuncoro

Jakarta, Januari 2020
**Kepala Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan**



Hilma

PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	Mengumpulkan Bahan untuk Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Saran/Rekomendasi Hasil Pengawasan	90%
		Mengumpulkan Bahan dan Menyiapkan Konsep Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal	2 Laporan
2	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Mengumpulkan Bahan dan Menyiapkan Konsep Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Triwulan	4 Laporan
		Mengumpulkan Bahan dan Menyiapkan Konsep Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Reviu Inspektorat Jenderal	1 Laporan

Kepala Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Hilma

Jakarta, Januari 2020
 Pelaksana Subbagian Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Jaenudin Sukrilah

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Menyusun Laporan Analisis Atas Laporan Hasil Pengawasan Per Program Kementerian Perindustrian	9 Laporan
		Menyusun Laporan Evaluasi Isu-isu aktual bidang pengawasan	2 Laporan
2	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Menyusun Laporan Evaluasi Atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan	4 Laporan
		Menyusun Laporan APIP Semesteran	2 Laporan

**Kepala Bagian Pengelolaan Tindak Lanjut
dan
Evaluasi Hasil Pengawasan**



Herry Rusli Kuncoro

Jakarta, Januari 2020
**Kepala Subbagian Evaluasi
Hasil Pengawasan**



Desmy Fitra

**PERJANJIAN KINERJA
STAFF SUBBAGIAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Mengolah Data Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II, dan Data Tambahan Penyusunan Laporan Analisis Atas Laporan Hasil Pengawasan Per Program Kementerian Perindustrian	4 Dokumen
		Mengolah Data Laporan Hasil Pengawasan dan Data Tambahan Penyusunan Laporan Evaluasi Isu-Isu Aktual Bidang Pengawasan	2 Dokumen
2	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Mengumpulkan dan Mengarsipkan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I dan II	12 bulan layanan
		Mengolah Data Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I dan Inspektorat II Penyusunan Laporan Evaluasi Atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan	4 Dokumen
		Mengolah Data Laporan Hasil Pengawasan Penyusunan Laporan APIP Semesteran	2 Dokumen

Jakarta, Januari 2020

Kepala Subbagian
Evaluasi Hasil Pengawasan



Desmy Fitra



Elizabeth Frycillya Aritonang

**PERJANJIAN KINERJA
STAFF SUBBAGIAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	Mengolah Data Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III dan Inspektorat IV, dan Data Tambahan Penyusunan Laporan Analisis Atas Laporan Hasil Pengawasan Per Program Kementerian Perindustrian	5 Dokumen
		Mengolah Data Laporan Hasil Pengawasan dan Data Tambahan Penyusunan Laporan Evaluasi Isu-isu aktual bidang pengawasan	2 Dokumen
2	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	Mengumpulkan dan Mengarsipkan Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III dan IV	12 bulan layanan
		Mengolah Data Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III dan Inspektorat IV Penyusunan Laporan Evaluasi Atas Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan	4 Dokumen
		Mengolah Data Laporan Hasil Pengawasan Penyusunan Laporan APIP Semesteran	2 Dokumen

Jakarta, Januari 2020

**Kepala Subbagian
Evaluasi Hasil Pengawasan**



Desmy Fitra



Noer Dwi Rizkia Putri

PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN EVALUASI, DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	1 laporan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dengan PKPT Melakukan pemantauan kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen perencanaan	4 laporan 10 dokumen

Jakarta, Januari 2020

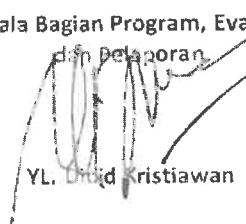
Kepala Sub Bagian Evaluasi, dan Pelaporan



Rika Betty Nurindah R

Kepala Bagian Program, Evaluasi

dan Pelaporan


YL. Umid Kristiawan

PERJANJIAN KINERJA
BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

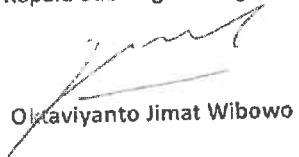
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Melaksanakan Penilaian Maturitas SPIP unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian	1 kegiatan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2021	1 dokumen
		Menyusun RKAKL 2021	1 dokumen
		Menyusun Kebijakan Pengawasan Tahun 2021	1 dokumen

Jakarta, Januari 2020

Kepala Bagian Program, Evaluasi


Y.L. Dedi Kristiawan

Kepala Sub Bagian Program


Oktaviyanto Jimat Wibowo

PERJANJIAN KINERJA
SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif	Melaksanakan administrasi kegiatan monitoring dan evaluasi dalam rangka menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	1 Laporan
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	Menyusun konsep laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Melaksanakan administrasi pada subbagian evaluasi dan pelaporan	8 Laporan 12 Layanan

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan



Rika Betty N.R.

Jakarta, Januari 2020
 Pelaksana Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan



Edi Purwanto

PERJANJIAN KINERJA
Bagian Keuangan dan Umum
Inspektorat Jenderal Tahun 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Sistem informasi pengawasan untuk pelaksanaan audit yang dapat dipergunakan oleh auditor	12%
2	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Terselenggaranya layanan gaji dan tunjangan	12 Bulan Layanan
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan	12 Bulan Layanan
		Terselenggaranya sarana, prasarana, dan operasional perkantoran	12 Bulan Layanan

Sekretaris Inspektorat Jenderal

Lilik Widodo

Jakarta, Januari 2020
Kepala Bagian Keuangan dan Umum

Heri Purnomo

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN**
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Melaksanakan verifikasi dokumen gaji dan tunjangan Inspektorat Jenderal	12 Bulan Layanan
		Melaksanakan verifikasi dokumen perpendaharaan Inspektorat Jenderal	12 Bulan Layanan
		Melakukan Rekonsiliasi Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal	12 Bulan Layanan

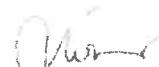
Kepala Bagian Keuangan dan Umum



Heri Purnomo

Jakarta, Januari 2020

Kepala Subbagian Keuangan



Nirna Fitri Yunahar

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Menyusun bahan penginputan SPM Mengarsipkan dokumen keuangan	12 Dokumen 120 Berkas

Jakarta,
Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan

Nirna Fitri Yunahar

Tarjan

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Membuat SPT JB, SPP, dan SPM Memperbaikan bahan Rekonsiliasi Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal Menyajikan bahan penyusunan Laporan Keuangan	12 Bulan Layanan 12 Dokumen 3 Laporan

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan

Nirma Fitri Yunahar

Kepala SubBagian Keuangan

Desita Prihapsari

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN**
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Mengarsipkan dokumen keuangan Mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan Membuat SPTJB, SPP, dan SPM	60 Berkas 60 Berkas 12 Bulan Layanan

Kepala Subbagian Keuangan


Nirna Fitri Yunahar

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan


Rosiana Taruni

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN**
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan pertandaaraan Inspektorat Jenderal Meiakukan pencatatan gaji dan tunjangan Inspektorat Jenderal	12 Belikas

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan



Munawir

Kepala Subbagian Keuangan



Nirna Fitri Yunahar

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN**

INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Membuat SPTJB, SPP, dan SPM Mempersiapkan bahan Rekonsiliasi Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal Menyiapkan bahan penyusunan Laporan BMN	12 Layanan 12 Dokumen 2 Laporan

Kepala Subbagian Keuangan

Nirma Fitri Yunahar

Jakarta,
Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan

Bagas Unggul Yudanta

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN**

INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Menyiapkan dan menyusun bahan rekonsiliasi keuangan	12 Berkas
		Menyiapkan dokumen hasil realisasi anggaran	48 Berkas

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan

Nirna Fitri Yunahar

Sutarno

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN**
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Mempersiapkan bahan untuk Rekonsiliasi Keuangan dan BMN Inspektorat Jenderal Menbuat SPT JB, SPP, dan SPM Menginput persediaan di aplikasi	12 Dokumen 12 Bulan Layanan 2 Laporan

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan



Farha Maulidia

Kepala Subbagian Keuangan



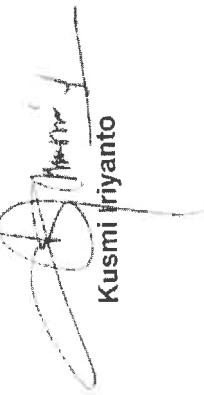
Nirna Fitri Yunahar

**PERJANJIAN KINERJA
SUBBAGIAN KEUANGAN
INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya APIP yang profesional dan berintegritas	Menyiapkan dokumen realisasi anggaran	12 Berkas
		Menpersiapkan dan Menginput Data Pengajuan Belanja Pegawai	12 Berkas
		Melakukan Pengcatatan dan Pengarsipan Belanja Pegawai	12 Berkas

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Subbagian Keuangan

Kepala Subbagian Keuangan



Nirna Fitri Yunahar



Kusmi Priyanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Rodjih Almanshoer
Jabatan: Inspektur I

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur Jenderal

Arus Gunawan

Inspektur I

Achmad Rodjih Almanshoer

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTUR I TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat I *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat I *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat I *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat I *) IKU	3,6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN

Peningkatan Pengawasan ~~dan Akuntabilitas~~ Pelaksanaan Program Pengembangan Industri
Inspektorat I

ANGGARAN
Rp3.400.000.000

Total Anggaran Tahun 2020 : Rp3.400.000.000
(Tiga miliar empat ratus juta rupiah)

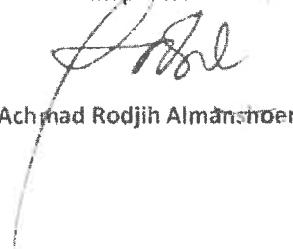
Inspektur Jenderal,



Arus Gunawan

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur I



Achmad Rodjih Almanshoer



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawas Swathatafrijiah

Jabatan: Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan

Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur Jenderal

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Arus Gunawan".

Arus Gunawan

Inspektur II

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wawas Swathatafrijiah".

Wawas Swathatafrijiah

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1 Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8%
		S2 Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5 Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPI	70%
		L2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II

ANGGARAN
Rp3,438,717,000

Total Anggaran Tahun 2020

Rp3.438,717,000
(Tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)

Inspektur Jenderal,



Arus Gunawan

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur II



Wawas Swathatafrijah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risniarti
Jabatan: Kepala Sub Bagian Program dan Tata Usaha Inspektorat II
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijiah
Jabatan: Inspektur II
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

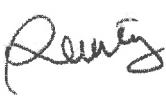
Jakarta, Januari 2020

Inspektur II

Kepala Sub Bagian Program dan

Tata Usaha

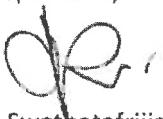

Wawas Swathatafrijiah

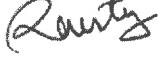

Risniarti

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

Jakarta, Januari 2020
Kepala Sub Bagian Program dan
Tata Usaha

Inspektur II,

Wawas Swathatafrijiah


Risniarti



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Hamid
Jabatan: Auditor Madya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

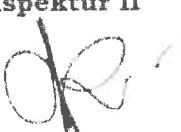
Nama : Wawas Swathatafrijah
Jabatan: Inspektur II

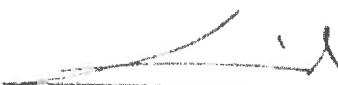
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020


B Inspektur II
Wawas Swathatafrijah


Auditor Madya
Abdul Hamid

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%

Jakarta, Januari 2020

Auditor Madya

Abdul Hamid

Inspektur II,


Wawas Swadhatrafijah





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Razali C
Jabatan: Auditor Madya

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020


Wawas Swathatafrijah


Razali C

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	28%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	36
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%

Jakarta, Januari 2020

Auditor Madya

Razali C

Inspektorat II,

Wawas Swadhatafrijiah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Giry Rachman
Jabatan: Auditor Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijiah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

W Inspektur II

A handwritten signature of Wawas Swathatafrijiah.

Wawas Swathatafrijiah

Auditor Muda

A handwritten signature of Giry Rachman.

Giry Rachman

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1 Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU S2 Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU S3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti S4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8% 5% 80% 91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5 Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan T2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	75% 76%

Inspektor II

Wawas Swatnatafrijah

Jakarta, Januari 2020

Auditor Muda


Giry Rachman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alexander Hamonangan Nainggolan
Jabatan: Auditor Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kini.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

WS Inspektur II
Wawas

Wawas Swathatafrijah

Auditor Muda
A. Hamonangan

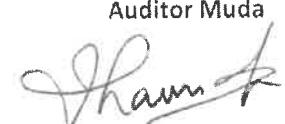
Alexander Hamonangan
Nainggolan

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1 Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU S2 Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU S3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti S4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8% 5% 80% 91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5 Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan T2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	75% 76%

Jakarta, 1 Januari 2020
Auditor Muda

 Wawas Swathatafrijah
 Inspektur II,


 Alexander Hamonangan Nainggolan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hariadi Amri
Jabatan: Auditor Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Inspektur II

Wawas Swathatafrijah

Auditor Muda

Hariadi Amri

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%

Jakarta, Januari 2020

Auditor Muda

Inspektorat II,

 Wawas Swathatafrijah


 Hariadi Amri



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agung Tri Utomo
Jabatan: Auditor Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

WS Inspektur II
WS
Wawas Swathatafrijah

Auditor Muda
ATU
Agung Tri Utomo

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%

Inspektur II,

Wawas Swathatafrijah

Jakarta, Januari 2020

Auditor Muda


Agung Tri Utomo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Harjanto
Jabatan: Auditor Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Wawas Swathatafrijah
Wawas Swathatafrijah
Inspektur II

Dwi Harjanto
Dwi Harjanto
Auditor Muda

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%

Jakarta, Januari 2020

Auditor Muda



Dwi Harjanto

Inspektur II,



Wawas Swathatafrijah



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizki Aviandri
Jabatan: Auditor Muda

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Inspektur II

Wawas Swathatafrijah

Auditor Muda

Rizki Aviandri

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1 Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU S2 Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU S3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti S4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8% 5% 80% 91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5 Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan T2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	75% 76%

Jakarta, Januari 2020

Auditor Muda

Inspektur II,

Wawas Swathatafrijiah


Rizki Avandri



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armanita Kusumaningrum
Jabatan: Auditor Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

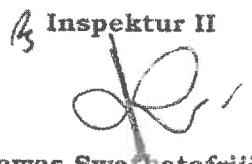
Nama : Wawas Swatnatafrijah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020


Inspektur II

Wawas Swatnatafrijah

Auditor Pertama


Armanita Kusumaningrum

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1 Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU S2 Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU S3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti S4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8% 5% 80% 91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5 Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan T2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	75% 76%

Jakarta, Januari 2020
Auditor Pertama

Inspektur II,

Wawas Swathatafrijah


Armanita Kusumaningrum



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Galih Tri Purnomo
Jabatan: Auditor Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijiah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

W.S. Inspektur II

Wawas Swathatafrijiah

Auditor Pertama

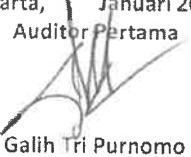
Galih Tri Purnomo

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%

Inspektor II,

Wawas Swachatafrijah

Jakarta, Januari 2020
Auditor Pertama

Galih Tri Purnomo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dinavita Rizkyanti
Jabatan: Auditor Pertama

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijiah
Jabatan: Inspektur II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

WS Inspektur II

Wawas Swathatafrijiah

Auditor Pertama

Dinavita Rizkyanti

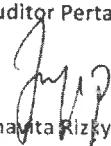
PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%

Inspektur II,

Wawas Swathatafrijah

Jakarta, Januari 2020
Auditor Pertama


Dina Yita Rizkyanti



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azka Rianto Tedja Ningrat
Jabatan: Pelaksana Sub Bagian Program dan Tata Usaha
Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Wawas Swathatafrijah
Jabatan: Inspektur II
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Kepala Sub Bagian Tata Program **Pelaksana Sub Bagian Program**
dan Tata Usaha **dan Tata Usaha**

Rismiarti

Azka Rianto Tedja Ningrat

PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	T1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
2	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

Kepala Sub Bagian Program dan Tata Usaha Inspektorat II,

Rismiarti

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Sub Bagian Program dan Tata Usaha

Azka Rianto Tedja Ningrat



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT III

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Pranata

Jabatan: Inspektur III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan

Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur Jenderal

Inspektur III



Arus Gunawan



Pranata

**KONSEP PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT III TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1 Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat III *) IKU S2 Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat III *) IKU S3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti S4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	1.5% 5% 80% 91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5 Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat III *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1 Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan T2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	75% 76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1 Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT L2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	70% 80%

KEGIATAN

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri
Inspektorat III

ANGGARAN
Rp3.373.590.000

Total Anggaran Tahun 2020

Rp3.373.590.000

(Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus
sembilan puluh ribu rupiah)

Inspektur Jenderal,

Arus Gunawan

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur III





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jonni Afrizon
Jabatan: Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur Jenderal

Inspektur IV


Arus Gunawan


Jonni Afrizon



PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT IV TAHUN 2020

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN				
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1	Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	2.8%
		S2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	5%
		S3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5	Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat IV *) IKU	3,6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL				
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN				
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan dengan PKPT	70%
		L2	Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat IV

ANGGARAN

Rp3.421.785.000

Total Anggaran Tahun 2020 : Rp3.421.785.000

(Tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Jakarta, 16 Maret 2020

Inspektur IV

Inspektur Jenderal

— *AG*
Arus Gunawan

JA
Johni Afrizon